



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar secara adil dan merata sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas dan tepat waktu perlu menerapkan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar minimal perlu menyusun rencana aksi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II RENAKSI PENERAPAN SPM TAHUN 2024-2026

### Pasal 2

Renaksi Penerapan SPM Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan SPM yang digunakan untuk:

- a. pedoman dan arahan bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  1. pendidikan;
  2. kesehatan;
  3. pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman
  4. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  5. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebencanaan;
  6. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
  7. sosial,dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

- b. pedoman bagi Daerah dalam penyusunan:
  - 1. dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah;
  - 2. pelaksanaan;
  - 3. pemantauan; dan
  - 4. evaluasi.

### Pasal 3

- (1) Renaksi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : kondisi dan permasalahan pemenuhan penerapan SPM;
  - c. bab III : strategi dan pemenuhan penerapan SPM;
  - d. bab IV : pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM; dan
  - e. bab V : kesimpulan dan saran.
- (2) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Tahun 2024-2026.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tim penerapan SPM Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan penerapan SPM tahun berikutnya.

### Pasal 5

- (1) Tim penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
  - a. penanggung jawab: Bupati;
  - b. ketua: Sekretaris Daerah;
  - c. wakil ketua I: asisten pemerintahan dan kesra pada Sekretariat Daerah;
  - d. wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
  - e. sekretaris: kepala bagian pemerintahan Sekretariat Daerah;
  - f. anggota terdiri atas:
    - 1. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar;
    - 2. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan terkait pengelolaan keuangan Daerah;
    - 3. inspektur;
    - 4. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
    - 5. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
    - 6. kepala Perangkat Daerah dan/atau kepala unit kerja sesuai dengan kebutuhan Daerah.

- (2) Tim penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM;
  - b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
  - c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah;
  - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah;
  - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
  - j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
  - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
  - m. melakukan rapat secara berkala; dan
  - n. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (3) Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim penerapan SPM dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM provinsi.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 12 Februari 2025

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN  
2024-2026

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2024-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib Pelayanan Dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang- kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan Renaksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

- a. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima Pelayanan Dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Magelang;
- b. menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
- c. menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan
- d. menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 KONDISI UMUM DAERAH

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

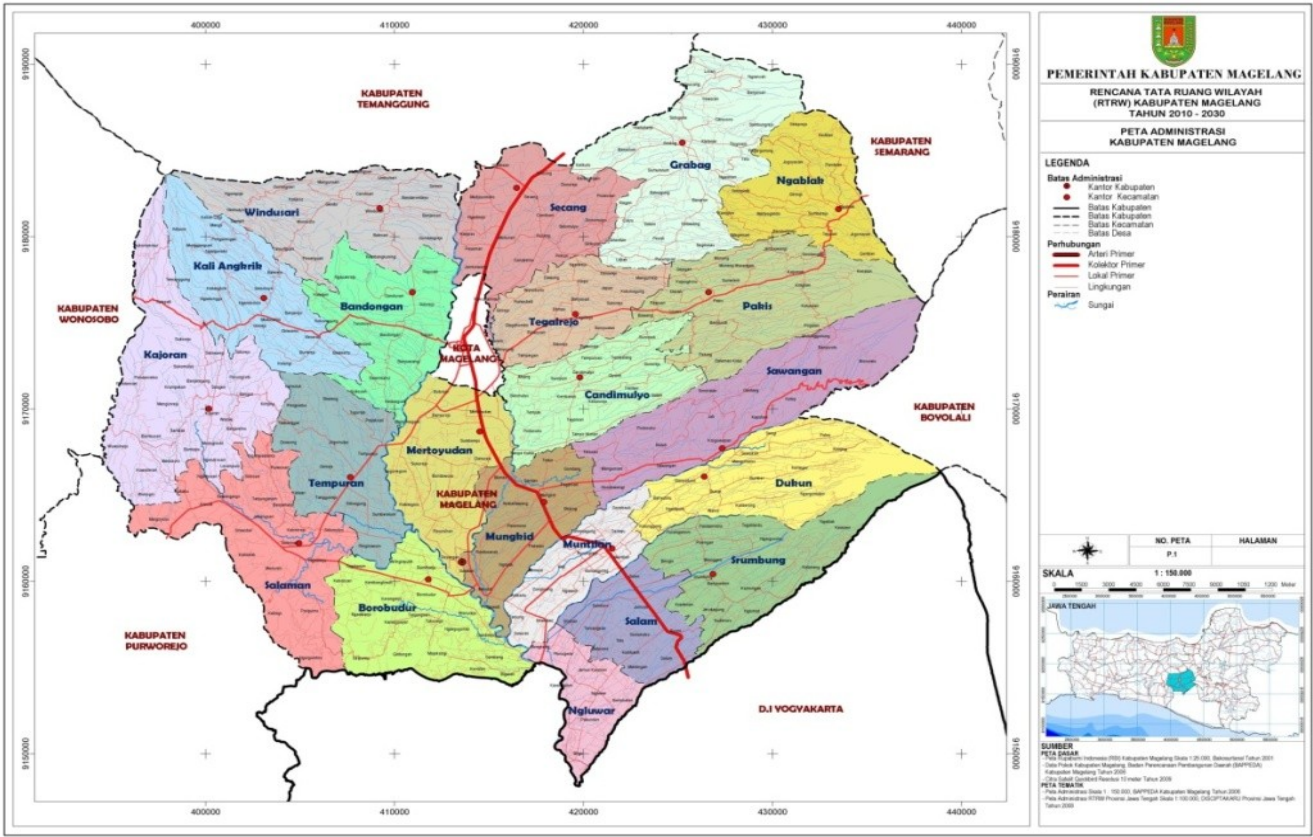
Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid, termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah berdasarkan publikasi BPS 1.085,730 km<sup>2</sup> (seribu delapan puluh lima koma tujuh tiga kilo meter persegi), sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas Kabupaten Magelang adalah 1.129,983 km<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh sembilan koma sembilan delapan tiga kilo meter persegi).

Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara 110°01' 51" – 110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13" – 7°42'16" Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara   | : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang        |
| Sebelah Timur   | : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali          |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Sebelah Barat   | : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo        |
| Bagian Tengah   | : Kota Magelang                                      |



Gambar 1.1  
Peta Wilayah Adminsitration Kabupaten Magelang



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada diantara jalur pantura dengan jalur pantai selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang. Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa, dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang.

Tabel 1.1  
Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan,  
serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan  
di Kabupaten Magelang Tahun 2022

No .	Kecamatan	Jumla h Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentas e (%)	Jarak ke Ibukota Kabupate n
1	Salaman	20	-	68,87	6,34	15
2	Borobudur	20	-	54,55	5,02	4
3	Ngluwar	8	-	22,44	2,07	22
4	Salam	12	-	31,63	2,91	19
5	Srumbung	17	-	53,18	4,90	19
6	Dukun	15	-	53,40	4,92	21
7	Muntilan	13	1	28,61	2,64	17

No .	Kecamatan	Jumla h Desa	Jumlah Keluraha n	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentas e (%)	Jarak ke Ibukota Kabupate n
8	Mungkid	14	2	37,40	3,44	7
9	Sawangan	15	-	72,37	6,67	15
10	Candimulyo	19	-	46,95	4,32	17
11	Mertoyudan	12	1	45,35	4,18	6
12	Tempuran	15	-	49,04	4,52	8
13	Kajoran	29	-	83,41	7,68	31
14	Kaliangkrik	20	-	57,34	5,28	34
15	Bandongan	14	-	45,79	4,22	20
16	Windusari	20	-	61,65	5,68	25
17	Secang	19	1	47,34	4,36	22
18	Tegalrejo	21	-	35,89	3,31	22
19	Pakis	20	-	69,56	6,41	29
20	Grabag	28	-	77,16	7,11	33
21	Ngablak	16	-	43,80	4,03	37
	Jumlah	367	5	1.085,73		

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2022

1.3.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Magelang secara topografis sangat beragam dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Daerah yang bertopografi datar seluas 8.599 ha, bergelombang seluas 44.784 ha, topografi curam seluas 41.037 ha, dan sangat curam seluas 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 meter di atas permukaan laut. Kelerengan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2  
Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

No.	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2%	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan, dan Salaman (± 1,5% dari luas wilayah)
2	2 – 15%	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah
3	15 – 40%	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan, dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah)
4.	> 40%	Berbukit sampai bergunung-gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan, dan Dukun (18% dari luas wilayah)

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Luas wilayah Kabupaten Magelang menurut penggunaannya terdiri atas lahan sawah, lahan kering, lahan pertanian bukan sawah, dan lahan bukan pertanian. Terdapat pengurangan luasan lahan sawah dari 27.026 ha pada tahun 2020 menjadi 25.269 ha pada tahun 2021. Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.3  
Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021 (Ha)

N o.	Penggunaan Lahan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021”
A	Lahan sawah					
1	Irigasi	27.73 2	27.73 2	22.91 1	22.38 3	21.342
2	Tadah hujan	8.949	8.949	4.988	4.643	3.927
	Jumlah	36.68 1	36.68 1	27.89 9	27.02 6	25.269
B	Lahan kering					
1	Tegal kebun	31.81 3	31.81 3	37.46 2	38.05 0	36.146
2	Perkebunan	2.317	2.317	2.725	2.725	2.728
3	Hutan rakyat	5.609	5.609	5.467	5.467	6.120
4	Padang rumput	2	2	2	2	61
5	Sementara tidak ditanami	7	7	9	36	67
6	Lainnya (kolam/empang/hutan negara)	9.746	9.746	3.207	3.054	6.394
7	Hutan Negara	-	-	6.500	6.500	5.785
	Jumlah	49.49 4	49.49 4	55.37 2	55.83 4	57.301
	Total lahan pertanian (A+B)	86.17 5	86.17 5	83.27 1	82.86 0	82.570
C	Lahan bukan pertanian					
1	(Jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll)	22.39 8	22.39 8	25.30 2	25.71 3	26.003
	TOTAL (A+B+C)	108.5 73	108.5 73	108.5 73	108.5 73	108.57 3

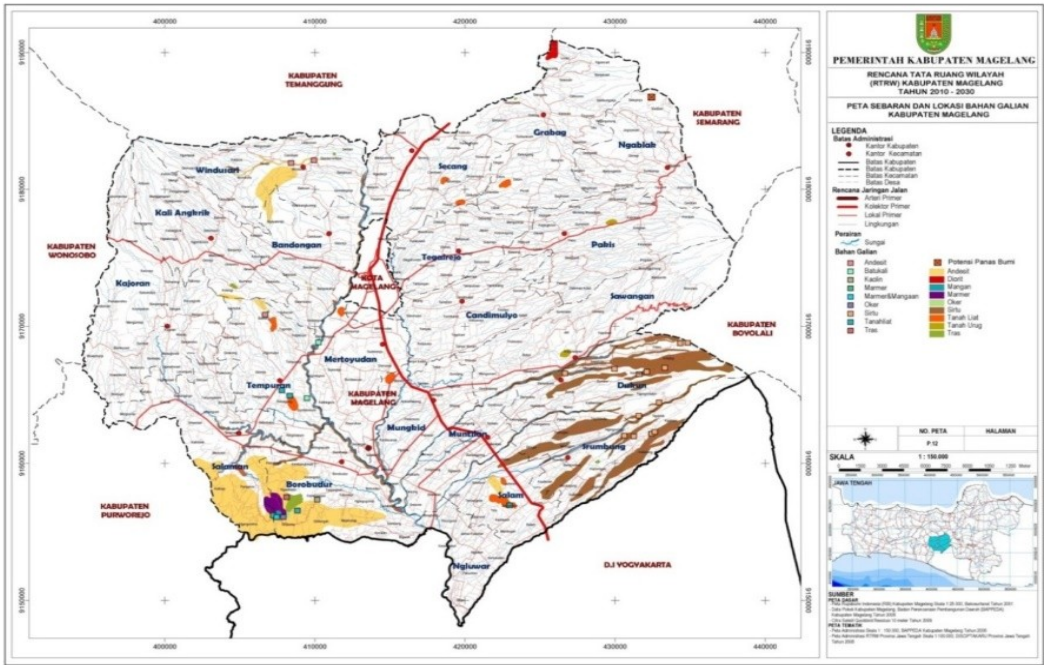
Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021  
\*) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2022

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas adalah lahan pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian dijadikan unggulan karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan. Berdasarkan hasil penghitungan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Magelang masuk dalam kategori daya dukung lahan bersyarat atau sedang dengan nilai 2,96. Kondisi tersebut mendekati kondisi daya dukung lahan baik jika nilai DDLB > 3. Dengan demikian, Kabupaten Magelang masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan. Namun untuk ke depannya harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten

Magelang.

Secara geologi, pada bagian barat daya (Kecamatan Salaman) dan bagian selatan (Kecamatan Borobudur) di wilayah Kabupaten Magelang tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa lapili, aglomerat, dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk Dataran Kabupaten Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.

Gambar 1.2  
Peta Sebaran Bahan Tambang di Kabupaten Magelang



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030

Secara fisik, Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan (basin) dan dikelilingi oleh gunung, mulai dari Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo dan Pegunungan Menoreh yang memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang, seperti berlimpahnya bahan galian tambang golongan B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Jenis bahan tambang yang jumlahnya relatif banyak adalah pasir batu dan marmer.

1.3.3 Hidrologi

Kabupaten Magelang memiliki curah hujan tinggi dan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya. Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto.

Luas dari wilayah DAS Progo adalah 246.207,78 Ha, yang berada di Provinsi Jawa Tengah seluas 175.047,66 Ha dan di Provinsi D.I. Yogyakarta seluas 71.160,12 Ha. Sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan DAS Progo bagian hulu seluas 107.637,97 Ha, yang terdapat sungai yang cukup besar yaitu Sungai Progo. DAS Progo ini meliputi 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Sedangkan DAS Bogowonto berada disebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran.

Potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan adalah:

- a. air permukaan yaitu air yang mengalir di sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai besar yang ada di Kabupaten Magelang adalah Sungai Progo; dan

- b. air tanah di Kabupaten Magelang air tanah berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu:
- 1) mandala air tanah gunung api strato, air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing. dan
  - 2) mandala air tanah antar pegunungan, air tanah jenis ini berada diantara Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 m di atas permukaan laut. Air tanah di Daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas aquifer yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (<10 m) dan debit sumur mencapai 4 liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung api besar yang menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Di dalam Profiling Mata Air tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, inventarisasi mata air dilakukan pada 307 mata air. Pengukuran debit mata air dilakukan dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2022. Hasil klasifikasi pengukuran debit mata air di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4  
Klasifikasi Mata Air Berdasarkan Pengukuran Debit Tahun 2019 – 2022

N o	Kelas	Debit (L/Detik)	Jumlah Mata Air Tahun 2019	Jumlah Mata Air Tahun 2020	Jumlah Mata Air Tahun 2021	Jumlah Mata Air Tahun 2022
1	I	$\geq 10.000$	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	II	$1000 \leq X < 10.000$	1 Mata Air	Tidak Ada	1 Mata Air	1 Mata Air
3	III	$100 \leq X < 1000$	20 Mata Air	22 Mata Air	19 Mata Air	17 Mata Air
4	IV	$10 \leq X < 100$	50 Mata Air	46 Mata Air	51 Mata Air	52 Mata Air
5	V	$1 \leq X < 10$	69 Mata Air	56 Mata Air	85 Mata Air	88 Mata Air
6	VI	$0.1 \leq X < 1$	81 Mata Air	90 Mata Air	85 Mata Air	81 Mata Air
7	VII	$0.01 \leq X < 0.1$	7 Mata Air	9 Mata Air	Tidak Ada	2 Mata Air
8	VIII	$< 0.01$	0 Mata Air	2 Mata Air	2 Mata Air	0 Mata Air
	Mati			1	2	3
	Tidak Ada Limpasan			42	57 (Kelas VIII)	18 (Kelas VIII)
	Tidak diukur					45
	Total Terukur		228	268	302	262
	Total Debit (L/detik)		8.971,89	8.510,38	9.682,66	9.959,00
	Total Debit (m3/tahun)		282.937.491,50	268.383.321,60	305.352.302,69	314.066.979,85

Sumber : Profiling Mata Air Kab. Magelang Tahun 2022

Sedangkan menurut hasil analisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, potensi air limpasan Kabupaten Magelang sebesar 1.181.862.220,51 m3/tahun dan potensi mata air sebesar 270.921.045,60 m3/tahun, sehingga total potensi ketersediaan air Kabupaten Magelang adalah sebesar 1.452.783.266,11 m3/tahun. Sedangkan kebutuhan air Kabupaten Magelang mencapai 912.851.010 m3/tahun. Nilai daya dukung air di Kabupaten Magelang berada pada kisaran 1,59 yang berarti daya dukung air Kabupaten Magelang termasuk dalam kelompok daya dukung bersyarat atau sedang.

Selain itu, keberadaan tiga gunung api besar di wilayah Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakan *recharge area* bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing tersebut merupakan *discharge area*. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *recharge area* dan *discharge area* di Kabupaten Magelang berada dalam satu wilayah administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan utamanya dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga

akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik.

1.3.4 Klimatologi

Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62°C dengan kelembaban udara 82%. Curah hujan rata-rata 3.922 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 189 hari dan kecepatan angin 1,8 knot.

Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang, curah hujan pada tahun 2019 berkisar antara 0 - 604 mm/bulan, tahun 2020 berkisar antara 20 - 507 mm/bulan, dan pada tahun 2021 berkisar antara 16 – 531 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt Ferguson, Mohr maupun Oldeman, Kabupaten Magelang sebagian besar bertipe iklim basah. Suatu bulan disebut bulan kering, jika dalam satu bulan terjadi curah hujan kurang dari 100 mm. Disebut bulan basah, jika dalam satu bulan curah hujannya lebih dari 200 mm.

Bulan basah dan bulan kering dikaitkan dengan kegiatan pertanian di Daerah tertentu, sehingga penggolongan iklimnya disebut juga zona agroklimat. Dengan jumlah curah hujan sebesar 200 mm tiap bulan dipandang cukup untuk membudidayakan padi sawah. Sedangkan untuk budi daya palawija, jumlah curah hujan minimal yang diperlukan adalah 100 mm tiap bulan.

1.3.5 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Magelang terdiri atas lahan sawah, lahan kering dan lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Pada tahun 2022 terdapat pengurangan luasan lahan sawah dari 36.681 hektar pada tahun 2018 menjadi 25.268 hektar pada tahun 2022. Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.5  
Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 (Ha)

No.	Penggunaan Lahan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021**	2022 **
A	Lahan sawah					
1	Irigasi	27.732	22.911	22.383	21.342	21.356
2	Tadah hujan	8.949	4.988	4.643	3.927	3.912
	Jumlah	36.681	27.899	27.026	25.269	25.268
B	Lahan kering					
1	Tegal kebun	31.813	37.462	38.050	36.146	38.730
2	Perkebunan	2.317	2.725	2.725	2.728	2.507
3	Hutan rakyat	5.609	5.467	5.467	6.120	6.122
4	Padang rumput	2	2	2	61	2
5	Sementara tidak ditanami	7	9	36	67	29
6	Lainnya (kolam/empang/hutan negara)	9.746	3.207	3.054	6.394	4.920
7	Hutan Negara	-	6.500	6.500	5.785	5.844
	Jumlah	49.494	55.372	55.834	57.301	56.368
	Total lahan pertanian (A+B)	86.175	83.271	82.860	82.570	81.636
C	Lahan bukan pertanian					
1	(Jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll)	22.398	25.302	25.713	26.003	26.937
	TOTAL (A+B+C)	108.573	108.57	108.573	108.573	108.573



No.	Penggunaan Lahan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021**	2022 **
			3			

*Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021*  
*\*\*) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2023*

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas adalah lahan pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian dijadikan unggulan karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan.

Berdasarkan hasil penghitungan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Magelang masuk dalam kategori daya dukung lahan bersyarat atau sedang dengan nilai 2,96. Kondisi tersebut mendekati kondisi daya dukung lahan baik jika nilai DDLB > 3. Dengan demikian, Kabupaten Magelang masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan. Namun untuk ke depannya harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten Magelang. Jika dilihat pada setiap kecamatan di Kabupaten Magelang, tidak ada kecamatan yang berada pada kategori terlampaui atau buruk. Kategori bersyarat/sedang terdapat di 12 kecamatan, yaitu di Kecamatan Borobudur, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan Salaman, Kecamatan Secang, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Tempuran. Sedangkan kategori baik terdapat di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Bandongan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Grabag, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Windusari.

Untuk mengetahui sejauh mana fungsi lindung di Kabupaten Magelang, maka perlu dilihat daya dukung fungsi lindung.

Tabel 1.6  
Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Magelang

Deskripsi Permukaan	Luas (Ha)	Luas (%)	Ci	Σ (ci x Ai)
Air Payau	0,19	0,00	0,98	0,19
Air Tawar	206,05	0,18	0,98	201,93
Badan Sungai	636,17	0,56	0,98	623,45
Belukar/Semak	5.847,74	5,18	0,28	1.637,37
Gedung	52,35	0,05	0,18	9,42
Hutan	637,94	0,56	1	637,94
Kebun	32.953,35	29,18	0,54	17.794,81
Pasir Darat	23,32	0,02	0,01	0,23
Pemukiman	17.843,42	15,80	0,18	3.211,82
Rumput	1.429,32	1,27	0,28	400,21
Sawah Irigasi	17.798,18	15,76	0,46	8.187,16
Sawah Tadah Huja	23.911,02	21,17	0,46	10.999,07
Tanah Berbatu	934,27	0,83	0,01	9,34
Tegalan	10.653,09	9,43	0,21	2.237,15
Jumlah	112.926,4	100,00		45.950,0

Deskripsi Permukaan	Luas (Ha)	Luas (%)	Ci	$\sum (ci \times Ai)$
	1			8

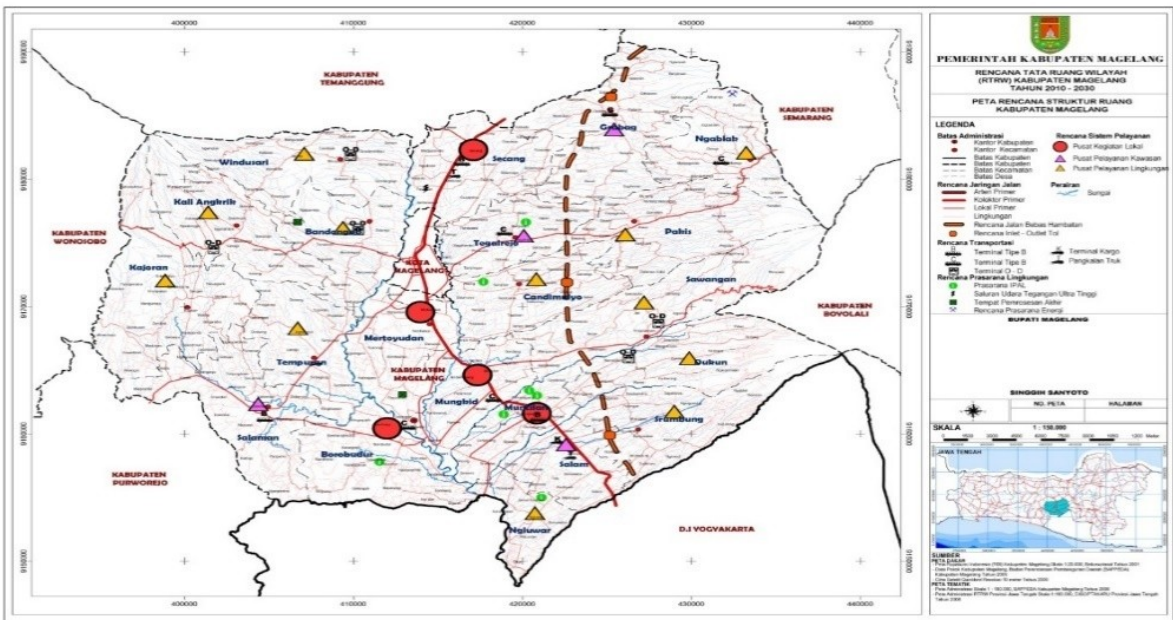
Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Magelang Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, maka daya dukung fungsi lindung Kabupaten Magelang memiliki koefisien 0,41 berada dalam kategori sedang. Luas lahan kebun memberikan kontribusi besar dalam daya dukung lindung yang tinggi, sementara permukiman dan lahan terbangun lainnya menyebabkan daya dukung lindung menjadi kecil.

1.3.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Magelang untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya sesuai dengan RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030. Potensi pengembangan wilayah ini didasarkan pada rencana struktur ruang dan pola ruang yang ada dalam RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.

Gambar 1.3  
Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030

Struktur ruang dimaksudkan untuk dapat mewujudkan pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan sebagai sistem pusat pelayanan dan jaringan prasarana wilayah. Sedangkan pola ruang adalah pendistribusian peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Peruntukan pola ruang fungsi budi daya di Kabupaten Magelang akan memperlihatkan potensi pengembangan pada masing-masing wilayah di Kabupaten Magelang, secara detail dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7

Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang  
Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan peruntukan hutan produksi	



No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1.a.	Hutan produksi terbatas	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak , dan Windusari
1.b.	Hutan produksi tetap	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salaman, Tempuran, dan Windusari
2	Kawasan hutan rakyat	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salam, Sawangan, Secang, Tempuran, dan Windusari
3	Kawasan peruntukan pertanian	
3.a.	Kawasan pertanian lahan basah	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
3.b.	Kawasan pertanian lahan kering	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
4	Kawasan peruntukan perkebunan	Kecamatan Grabag, Kajoran, Dukun, Borobudur, dan Salaman
5	Kawasan peruntukan perikanan	
5.a.	Daerah pembenihan	Kecamatan Muntilan, Sawangan, Dukun, Grabag, dan Mungkid
5.b.	Daerah pembesaran perikanan	Kecamatan Salam, Ngluwar, Mertoyudan, Kajoran, Bandongan, Secang, Srumbung, Candimulyo, dan Tegalrejo
6	Kawasan peruntukan peternakan	
6.a.	Kawasan peternakan besar	Kecamatan Sawangan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo, dan Kaliangkrik, Bandongan, Secang, Srumbung, dan Salam
6.b.	Kawasan peternakan sedang	Semua kecamatan
6.c.	Kawasan peternakan unggas	Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Secang, Salaman, Tempuran, Bandongan, Candimulyo, Grabag, Mertoyudan, dan Ngluwar
7	Kawasan peruntukan pertambangan	
7.a.	Kawasan peruntukan pertambangan batuan pasir batu	Kecamatan Windusari, Bandongan, Borobudur, Srumbung, Dukun, Pakis, Salam, Candimulyo, Muntilan, Ngluwar, Tempuran, Salam, Secang, Grabag, dan Salaman.
7.b.	Kawasan peruntukan pertambangan batuan	Kecamatan Borobudur, Salaman, Tempuran, Bandongan, dan Windusari.

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	marmer	
7.c.	Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam	Kecamatan Borobudur dan Salaman
8	Kawasan peruntukan pariwisata	
8.a.	Kawasan peruntukan pariwisata budaya	Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Gunung Wukir/Canggal, Candi Asu, Candi Pendem, Candi Lumbung, Candi Selogriyo, Makam Gunung Pring, Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogoreso, Makam Pasteur Van Lith, Makam Kyai Condrobumi, Makam Sunan Geseng, Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Pasarean Pangeran Singosari, Makam Kyai Mijil, Makam Kyai Raden Syahid, dan Candi Umbul
8.b.	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Air Terjun Sekarlangit, Air Terjun Seloprojo, Ketep Pass, Air Terjun Kedungkayang, Agro Wanawisata Sambak, Agro Wisata Salak Lumut, Pendakian Gunung Merapi, Pendakian Gunung Merbabu, Curug Silawe, dan Telaga Bleder
8.c.	Kawasan peruntukan pariwisata buatan	Taman Rekreasi Mendut, Ketep Pass, Induk Selokan Mataram (Wisata Bendungan Ancol), Taman Rekreasi Kalibening, dan Deyangan
9	Kawasan peruntukan industri	
9.a.	Kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah	tersebar di masing-masing kecamatan
9.b.	Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus	tersebar di masing-masing kecamatan
9.c.	Kawasan peruntukan industri besar	Kecamatan Tempuran dan Salaman
10	Kawasan peruntukan permukiman	
10.a.	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</li><li>2. Perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)</li><li>3. Ibukota-ibukota kecamatan yang meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan, dan Candimulyo</li></ol>
10.b.	Kawasan peruntukan	tersebar di luar ibukota kecamatan

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	permukiman perdesaan	
11	Kawasan peruntukan lainnya	
11.a.	Kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Bandongan, Windusari, Borobudur, Salaman, Candimulyo, dan Tempuran
11.b.	Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	tersebar di masing-masing kecamatan

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Dalam rangka membentuk dan memperkuat pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat pelayanan serta mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, maka pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan peranan sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (*main-prime-mover*), yaitu sebagai berikut:

- a. kawasan strategis cepat tumbuh meliputi perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, serta Perkotaan Salam dan sekitarnya;
- b. kawasan pertanian berbasis potensi lokal dengan konsep pengembangan agropolitan dan minapolitan, meliputi Kawasan Agropolitan Sumbing, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, Kawasan Agropolitan Borobudur, dan Kawasan Minapolitan;
- c. kawasan strategis pariwisata dengan konsep menumbuh-kembangkan potensi-potensi wisata Daerah dalam rangka menciptakan beragam alternatif daya tarik wisata selain Candi Borobudur, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata A di Wilayah Sumbing dan sekitarnya, Kawasan Strategis B di Wilayah Merapi-Merbabu dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata C di Wilayah Merapi dan sekitarnya, dan Kawasan Strategis Pariwisata D di Wilayah Borobudur dan sekitarnya; dan
- d. kawasan peruntukan industri yang berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal.

Selain pusat-pusat kegiatan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang, struktur ruang Kabupaten Magelang, juga dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan administratif, yaitu:

- a. pusat pelayanan administratif kabupaten/ibukota Kabupaten adalah Kota Mungkid;
- b. pusat pelayanan administratif kecamatan meliputi ibukota kecamatan : Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabag, dan Ngablak;
- c. pusat pelayanan administratif kelurahan meliputi ibukota kelurahan : Secang, Sumberejo, Muntilan, Mendut, dan Sawitan; dan
- d. pusat pelayanan administratif desa meliputi 367 ibukota desa.

Dalam rangka memperkuat fungsi aksesibilitas dan mobilitas guna mendorong terciptanya distribusi pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh kawasan dan pusat kegiatan, dilakukan pengembangan sarana dan prasarana wilayah. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penataan ulang jaringan trayek angkutan umum. Penataan ulang jaringan trayek angkutan umum diarahkan pada:

- a. penguatan akses dan mobilitas wisatawan dari Borobudur ke DTW lokal ;
- b. penguatan akses dan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat kegiatan;
- c. penguatan akses dan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat pelayanan;

- d. penguatan akses dan mobilitas di kawasan perkotaan; dan
- e. penguatan akses dan mobilitas di kawasan perdesaan.

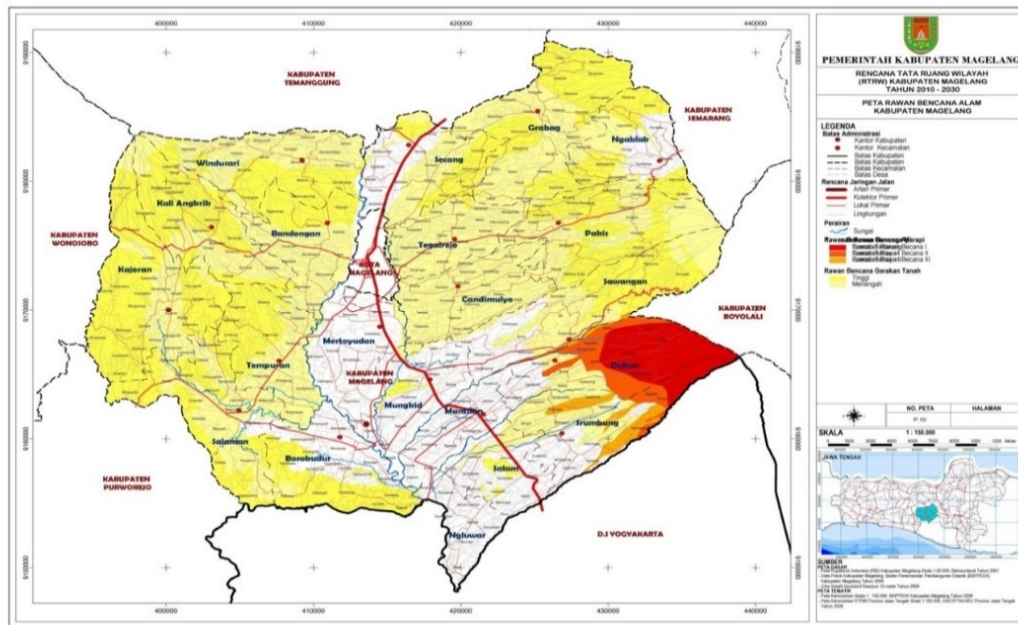
Dilihat kedudukan Kabupaten Magelang di Jawa Tengah sebagai bagian dari wilayah pengembangan Purwomanggung, maka pengembangan transportasi berupa angkutan massal Berbasis Jalan/Operasionalisasi BRT Trans Jateng pada koridor Purworejo – Magelang bisa ditangkap sebagai potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang. Banyak wilayah yang dilalui secara langsung akan berkembang secara pesat dan menimbulkan efek pada wilayah sekitarnya.

#### 1.3.7 Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam terutama yang terjadi di wilayah kabupaten ini merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Merapi. Ancaman bencana yang disebabkan oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang, antara lain:

- a. tanah longsor di 21 kecamatan;
- b. banjir di aliran sungai terutama di Sungai Progo dan Sungai Elo;
- c. angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 21 kecamatan;
- d. kekeringan/krisis air bersih di 21 kecamatan (kemarau panjang), sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Borobudur (Desa Kenalan, Desa Candirejo, Desa Kembanglimus, Desa Wringinputih, Desa Bumiharjo dan Desa Giritengah), Kecamatan Kajoran (Desa Wonogiri) serta Kecamatan Salaman (Desa Margoyoso dan Desa Ngargoretno);
- e. Kebakaran hutan;
- f. Sebagian besar Wilayah Kabupaten Magelang yang memiliki kemiringan lereng >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah;
- g. Letusan Gunung Merapi, 3 kecamatan berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III. Wilayah KRB III berada pada radius 0-10 km, meliputi Kecamatan Srumbung (Kaliurang, Kemiren, Ngablak, Nglumut, Tegalrandu, Mranggen, Ngargosoko, dan Srumbung), Kecamatan Dukun (Sengi, Sewukan, Paten, Krinjing, Kalibening, Sumber, Ngargomulyo, dan Keningar), dan Kecamatan Sawangan (Wonolelo, Kapuhan, dan Ketep);
- h. Aliran awan panas, gas racun, lontaran batu pijar, lontaran material, aliran lava, dan aliran lahar Gunung Merapi, terdiri atas 16 desa di 3 kecamatan yang merupakan Kawasan Rawan Bencana II; dan
- i. lahar/banjir dampak sekunder dari letusan Gunung Merapi meliputi: sepanjang aliran sungai Krasak, Bebeng, Sat, Putih, Blongkeng, Pabelan, Trinsing dan Apu yang merupakan Kawasan Rawan Bencana I.

Gambar 1.4  
Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030, 2011

Pengelolaan risiko bencana letusan gunung api di Kabupaten Magelang dilakukan melalui upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat, khususnya yang berada di Kawasan Rawan Bencana. Saat ini Kabupaten Magelang melakukan upaya pengurangan risiko terhadap bencana letusan gunung api melalui penyusunan Rencana Kontijensi, sistem peringatan dini serta pembangunan sarana dan prasarana evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk bencana erupsi gunung api. Di dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 upaya penanganan bencana dapat dilakukan dengan cara membangun infrastruktur evakuasi seperti rambu evakuasi, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara.

Jalur-jalur evakuasi yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi di Kabupaten Magelang Jawa Tengah dalam kondisi rusak parah. Padahal jalur-jalur evakuasi yang berada di desa-desa di lereng Gunung Merapi tersebut, merupakan akses satu-satunya untuk lalu lintas evakuasi warga jika sewaktu-waktu terjadi erupsi Gunung Merapi. BPBD Kabupaten Magelang telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait infrastruktur seperti jalan dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

Jalan-jalan evakuasi tersebut kondisinya sebagian besar rusak, sehingga akan mengganggu kelancaran proses evakuasi. Namun yang menjadi kendala, jalan-jalan tersebut merupakan jalan desa yang perbaikannya menjadi tanggungjawab desa, bukan DPUPR Kabupaten Magelang. Sehingga DPUPR Kabupaten Magelang tidak dapat menganggarkan perbaikan jalur-jalur evakuasi tersebut melalui APBD. Untuk itu perlu dicarikan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tercatat ada 19 jalur evakuasi yang menghubungkan kawasan/desa rawan bencana dengan desa penyangga di bawahnya, yaitu:

- dari Desa Kalibening Kecamatan Dukun menuju Desa Adikarto dan Desa Tanjung Kecamatan Muntilan;
- dari Desa Krinjing Kecamatan Dukun menuju Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan;
- dari Desa Paten Kecamatan Dukun menuju Desa Gondang, Bumirejo, Paremono Kecamatan Mungkid; Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan;
- dari Desa Sengi Kecamatan Dukun menuju Desa Treko, Desa Senden, Kecamatan Mungkid dan Desa Butuh, Desa Tirtosari, Desa Jati Kecamatan Sawangan;
- dari Desa Sewukan Kecamatan Dukun menuju Desa Ambartawang, Desa Rambeanak, Desa Mungkid Kecamatan Mungkid;
- dari Ngargomulyo Kecamatan Dukun menuju Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan;

- g. dari Sumber Kecamatan Dukun menuju Desa Pucungrejo dan Desa Ngawen Kecamatan Muntilan;
- h. dari Keningar Kecamatan Dukun Menuju Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid;
- i. dari Kaliurang Kecamatan Srumbung menuju Desa Jamuskauman, Desa Pakunden, dan Desa Bligo Kecamatan Ngluwar;
- j. dari Desa Ngablak Kecamatan Srumbung menuju Desa Kradenan Kec. Srumbung; Desa Kadiluwih, Desa Somoketro dan Desa Tirto Kecamatan Salam;
- k. dari Desa Kemiren Kec. Srumbung menuju Desa Salam Kecamatan Salam;
- l. dari Desa Nglumut Kec. Srumbung menuju Desa Sucen Kecamatan Salam;
- m. dari Desa Srumbung Kecamatan Srumbung menuju Desa Baturono Kecamatan Salam;
- n. dari Desa Mranggen Kec. Srumbung menuju Desa Gunungpring dan Desa Sokorini Kecamatan Muntilan;
- o. dari Desa Tegalrandu Kecamatan Srumbung menuju Desa Bringin Kecamatan Srumbung; Desa Pabelan Kecamatan Mungkid; Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur;
- p. dari Desa Ngargosoko Kecamatan Srumbung menuju Desa Gulon Kecamatan Salam;
- q. dari Desa Kapuhan Kecamatan Sawangan menuju Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan;
- r. dari Desa Ketep Kecamatan Sawangan menuju Desa Podosoko dan Wulungunung Kecamatan Sawangan; Desa Ketundan Kecamatan Pakis; Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan; dan
- s. dari Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan menuju Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan; Desa Pogalan Kecamatan Pakis.

Berkaitan dengan pengurangan risiko bencana upaya mitigasi merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dipersiapkan. Mitigasi bencana sebagaimana dituangkan dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (mitigasi struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi non struktural).

Bercermin dari pengalaman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Magelang menghadirkan program penanggulangan bencana berbasis komunitas, yang disebut dengan *sister village* atau desa bersaudara. Konsep dasar dari *sister village* ini adalah adanya kerjasama antara desa rawan bencana erupsi sebagai asal pengungsi dengan desa diluar kawasan rawan bencana atau tidak terkena dampak erupsi sebagai tempat pengungsian. Tidak hanya itu konsep *sister village* bisa diterapkan juga untuk mitigasi dan penanggulangan bencana lainnya seperti tanah longsor dan banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang terus membentuk Desa Bersaudara atau *Sister Village* dalam upaya mitigasi terhadap bencana erupsi Gunung Merapi. Hingga tahun 2022 sebanyak 20 desa bersaudara yang telah terbentuk. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8.  
Desa Bersaudara (*Sister Village*)

No	Desa Kawasan Rawan Bencana (KRB)		Kecamatan	Desa Tujuan (Penyangga)
	KRB III	KRB II		
1	Kaliurang 2.516 Jiwa		Srumbung	- Jamuskauman, Kec. Ngluwar - Pakunden, Kec. Ngluwar - Bligo, Kec. Ngluwar

No	Desa Kawasan Rawan Bencana (KRB)		Kecamatan	Desa Tujuan (Penyangga)
	KRB III	KRB II		
2	Nglumut 798 Jiwa		Srumbung	- Sucen, Kec.Salam
3	Ngablak 2.412 Jiwa		Srumbung	- Kradenan, Kec. Srumbung - Somoketro, Kec. Salam - Tirto, Kec. Salam - Kadiluwih, Kec. Salam
4	Ngargosoko 2.264 Jiwa		Srumbung	- Gulon, Kec.Salam - Seloboro, Kec.Salam
5	Tegalrandu 2.297 Jiwa		Srumbung	- Bringin, Kec. Srumbung - Pabelan, Kec. Mungkid - Wanurejo, Kec. Borobudur
6	Mranggen 4.375 Jiwa		Srumbung	- Gunungpring, Kec. Muntilan - Sokorini, Kec. Muntilan
7	Srumbung 3.842 Jiwa		Srumbung	- Baturono, Kec. Salam - Tersangede, Kec. Salam
8	Kemiren 1.174 Jiwa		Srumbung	- Salam, Kec. Salam
9	Kapuhan 3.396 Jiwa		Sawangan	- Mangunsari, Kec. Sawangan
10	Wonolelo 6.447 Jiwa		Sawangan	- Banyuroto, Kec.S awangan - Pogalan, Kec. Pakis
11	Ketep 2.420 Jiwa		Sawangan	- Wulunggunung, Kec. Sawangan - Podosoko, Kec. Sawangan - Ketundan, Kec. Pakis
12	Sumber 3.802 Jiwa		Dukun	- Pucungrejo, Kec. Muntilan - Sedayu, Kec. Muntilan - Ngawen, Kec. Muntilan
13	Ngargomulyo 2.514 Jiwa		Dukun	- Tamanagung, Kec. Muntilan
14	Kalibening 2.582 Jiwa		Dukun	- Adikarto, Kec. Muntilan - Tanjung, Kec. Muntilan
15	Sengi 4.404 Jiwa		Dukun	- Jati, Kec. Sawangan - Tirtosari, Kec. Sawangan - Butuh, Kec. Sawangan - Senden, Kec. Mungkid - Treko, Kec. Mungkid
16	Sewukan 2.498 Jiwa		Dukun	- Ambartawang, Kec. Mungkid - Rambeanak, Kec. Mungkid - Mungkid, Kec. Mungkid
17	Paten 3.092 Jiwa		Dukun	- Gondang, Kec. Mungkid - Paremono, Kec. Mungkid - Bumirejo, Kec. Mungkid - Banyurojo, Kec. Mertoyudan - Mertoyudan, Kec.

No	Desa Kawasan Rawan Bencana (KRB)		Kecamatan	Desa Tujuan (Penyangga)
	KRB III	KRB II		
				Mertoyudan
18	Keningar 605 Jiwa		Dukun	- Ngrajek, Kec. Mungkid
19	Krinjing 2.156 Jiwa		Dukun	- Deyangan, Kec. Mertoyudan
20		Dukun 2.456 Jiwa	Dukun	- Bojong, Kec. Mungkid - Sriwedari, Kec. Muntilan
21		Mangunsoko 856 Jiwa	Dukun	- Giyanti, Kec. Candimulyo
22	Tlogolele (Kab.Boyolali)		Selo	- Donorojo, Kec. Mertoyudan - Mertoyudan, Kec. Mertoyudan

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2022

1.3.7.1 Indeks Resiko Bencana

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerabilities*), dan kapasitas (*capacities*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempabumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sedangkan komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan Daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya.

Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, oleh karena itu indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Dalam analisis data, pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%.

Saat ini Kabupaten Magelang sudah mempunyai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dokumen RPB dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi PRB juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga harus mengurangi risiko bencana.

Dengan disusunnya dokumen RPB ini, maka semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan hingga ke rehabilitasi dan rekonstruksi, diharuskan untuk mengacu pada dokumen ini. Dalam tahap implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah disusun ini dapat dimasukkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) dari masing-masing. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Magelang.

Hasil perhitungan indeks risiko bencana di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dari skor



143.20 pada tahun 2015, menjadi 75,1 pada tahun 2019 kemudian menurun lagi menjadi 71,16 pada tahun 2020 dan 2021. Walaupun Kabupaten Magelang termasuk Daerah rawan bencana, tetapi berdasarkan skor di atas Kabupaten Magelang berhasil menurunkan skor indeks resiko bencana dengan kelas resiko “sedang”. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menurunkan tingkat kerentanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dianggap sangat baik.

1.3.8 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 mencapai 1.311.044 jiwa. Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (111.004 jiwa), kemudian Kecamatan Grabag (95.105 jiwa) dan Secang (82.879 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (32.690 jiwa). Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Magelang dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9.

Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					(%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Salaman	73.372	73.913	74.561	74.973	75.367	5,75
2	Borobudur	61.305	62.517	62.970	63.397	63.994	4,88
3	Ngluwar	32.319	32.710	32.709	32.544	32.690	2,49
4	Salam	47.631	48.257	48.149	47.764	48.101	3,67
5	Srumbung	48.080	48.847	49.073	48.988	49.077	3,74
6	Dukun	46.900	47.187	47.110	46.969	47.258	3,60
7	Muntilan	79.136	79.372	79.348	79.681	80.043	6,11
8	Mungkid	74.295	74.602	74.653	74.070	74.363	5,67
9	Sawangan	57.287	57.986	57.293	57.575	57.964	4,42
10	Candimulyo	50.091	50.424	50.121	50.450	50.706	3,87
11	Mertoyudan	109.233	109.652	109.803	110.684	111.004	8,47
12	Tempuran	51.041	51.585	52.218	52.497	52.894	4,03
13	Kajoran	59.929	59.776	60.217	60.877	61.353	4,68
14	Kaliangkrik	59.575	59.405	59.808	60.597	61.174	4,67
15	Bandongan	60.916	60.481	61.085	61.812	62.326	4,75
16	Windusari	52.156	50.894	51.604	52.430	52.951	4,04
17	Secang	80.914	80.291	80.894	81.984	82.879	6,32
18	Tegalrejo	52.981	53.369	53.510	53.587	53.906	4,11
19	Pakis	52.819	53.988	54.159	55.048	55.562	4,24
20	Grabag	91.559	92.212	93.252	94.394	95.105	7,25
21	Ngablak	41.866	42.647	42.482	42.113	42.327	3,23
	Jumlah	1.283.405	1.290.115	1.295.019	1.302.434	1.311.044	100

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

Dilihat dari sisi persebaran penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan, pada tahun 2021 terlihat bahwa penduduk hampir tersebar merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mertoyudan (8,47%), disusul dengan Kecamatan Grabag (7,25%), sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (2,49%).

Penduduk akan banyak dijumpai pada Daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang

memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Daerah yang memiliki kepadatan tinggi merupakan Daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang tinggi dan sebaliknya. Berikut tabel yang menyajikan kepadatan penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan.

Tabel 1.10.  
Kepadatan Penduduk di Kabupaten Magelang  
per Kecamatan Tahun 2017 – 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)				
			2017*	2018**	2019**	2020**	2021**
1	Salaman	68,87	1.065,3 <sub>7</sub>	1.073,2 <sub>2</sub>	1082.63	1.088,6 <sub>2</sub>	1.094,3 <sub>4</sub>
2	Borobudur	54,55	1.123,8 <sub>3</sub>	1.146,0 <sub>5</sub>	1154.35	1.162,1 <sub>8</sub>	1.173,1 <sub>3</sub>
3	Ngluwar	22,44	1.440,2 <sub>4</sub>	1.457,6 <sub>6</sub>	1457.62	1.450,2 <sub>7</sub>	1.456,7 <sub>7</sub>
4	Salam	31,63	1.505,8 <sub>8</sub>	1.525,6 <sub>7</sub>	1522.26	1.510,0 <sub>9</sub>	1.520,7 <sub>4</sub>
5	Srumbung	53,18	904,1	918,52	922.77	921,17	922,85
6	Dukun	53,4	878,28	883,65	882.21	879,57	884,98
7	Muntilan	28,61	2.766,0 <sub>3</sub>	2.774,2 <sub>7</sub>	2773.44	2.785,0 <sub>7</sub>	2.796,0 <sub>0</sub>
8	Mungkid	37,4	1.986,5 <sub>0</sub>	1.994,7 <sub>1</sub>	1996.07	1.980,4 <sub>8</sub>	2.140,1 <sub>9</sub>
9	Sawangan	72,37	791,58	801,24	791.67	795,56	1.027,5 <sub>4</sub>
10	Candimulyo	46,95	1.066,9 <sub>0</sub>	1.073,9 <sub>9</sub>	1067.54	1074,54	2.364,3 <sub>0</sub>
11	Mertoyudan	45,35	2.408,6 <sub>7</sub>	2.417,9 <sub>1</sub>	2421.23	2.440,6 <sub>6</sub>	1.166,3 <sub>5</sub>
12	Tempuran	49,04	1.040,8 <sub>0</sub>	1.051,9 <sub>0</sub>	1064.80	1.070,4 <sub>9</sub>	1.251,0 <sub>8</sub>
13	Kajoran	83,41	718,49	716,65	721.94	729,85	733,41
14	Kaliangkrik	57,34	1.038,9 <sub>8</sub>	1.036,0 <sub>1</sub>	1043.04	1.056,8 <sub>0</sub>	1.086,9 <sub>6</sub>
15	Bandongan	45,79	1.330,3 <sub>3</sub>	1.320,8 <sub>3</sub>	1334.02	1.349,9 <sub>0</sub>	1.107,3 <sub>6</sub>
16	Windusari	61,65	846	825,53	837.05	850,44	901,25
17	Secang	47,34	1.709,2 <sub>1</sub>	1.696,0 <sub>5</sub>	1708.79	1.731,8 <sub>1</sub>	894,11
18	Tegalrejo	35,89	1.476,2 <sub>1</sub>	1.487,0 <sub>2</sub>	1490.94	1.493,0 <sub>9</sub>	2.649,9 <sub>0</sub>
19	Pakis	69,56	759,33	776,14	778.59	791,37	774,96
20	Grabag	77,16	1.186,6 <sub>1</sub>	1.195,0 <sub>8</sub>	1208.55	1.223,3 <sub>5</sub>	1.074,1 <sub>2</sub>
21	Ngablak	43,8	955,84	973,68	969.91	961,48	1.208,9 <sub>3</sub>
Jumlah		1.085,7 <sub>3</sub>	1.182,0 <sub>7</sub>	1.188,2 <sub>5</sub>	1.192,7 <sub>6</sub>	1.199,5 <sub>9</sub>	1.207,5 <sub>2</sub>

Sumber:

1. *BPS, Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021\**
2. *Hasil Olahan, Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022\*\**

Kecamatan-kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi biasanya terletak di wilayah perkotaan atau yang dilintasi oleh Jalan Nasional Yogyakarta-Semarang dan merupakan kawasan strategis cepat tumbuh (Kecamatan Muntilan, Secang, Mungkid dan Mertoyudan). Hal ini memudahkan penduduk untuk mengakses sarana prasarana yang relatif lebih lengkap dan menjadi salah satu faktor penarik penduduk untuk tinggal di sana. Selain itu, faktor geografis berupa kondisi topografi bergunung atau berbukit turut mempengaruhi persebaran penduduk karena cukup sulit untuk pengembangan permukiman. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muntilan yang mencapai 2.796,00 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kajoran yaitu 733,41 km/jiwa<sup>2</sup>.

Struktur penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk usia 5 tahun ke atas menurut status pendidikan. Data pada tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa struktur penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Magelang masih didominasi oleh penduduk yang pendidikan terakhirnya SD/MI/ sederajat. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Magelang.

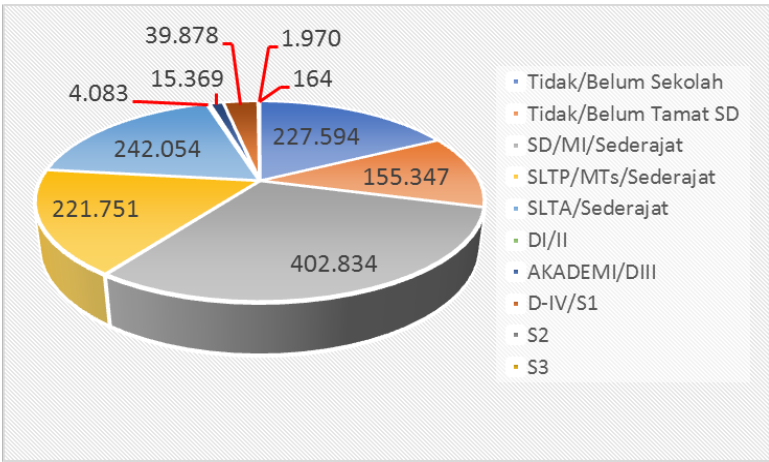
Tabel 1.11  
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tidak/Belum Sekolah	195.188	207.959	210.559	221.764	227.594
2	Tidak/Belum Tamat SD	167.215	160.204	161.637	158.138	155.347
3	SD/MI/Sederajat	432.488	424.710	420.936	407.409	402.834
4	SLTP/MTs/ Sederajat	215.060	217.129	217.310	219.833	221.751
5	SLTA/Sederajat	220.622	224.694	226.192	235.654	242.054
6	DI/II	4.421	4.324	4.219	4.143	4.083
7	AKADEMI/DIII	14.432	14.802	14.777	15.163	15.369
8	D-IV/S1		34.449	35.186	38.265	39.878
9	S2		1.648	1.706	1.891	1.970
10	S3		196	191	174	164
Jumlah		1.283.405	1.290.115	1.292.713	1.302.434	1.311.044

Sumber : *Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022.*

Grafik berikut menunjukkan penduduk dengan pendidikan SD/MI/ sederajat mendominasi di Kabupaten Magelang tahun 2021. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Kabupaten Magelang.

Gambar 1.5  
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan  
di Kabupaten Magelang pada Tahun 2021



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

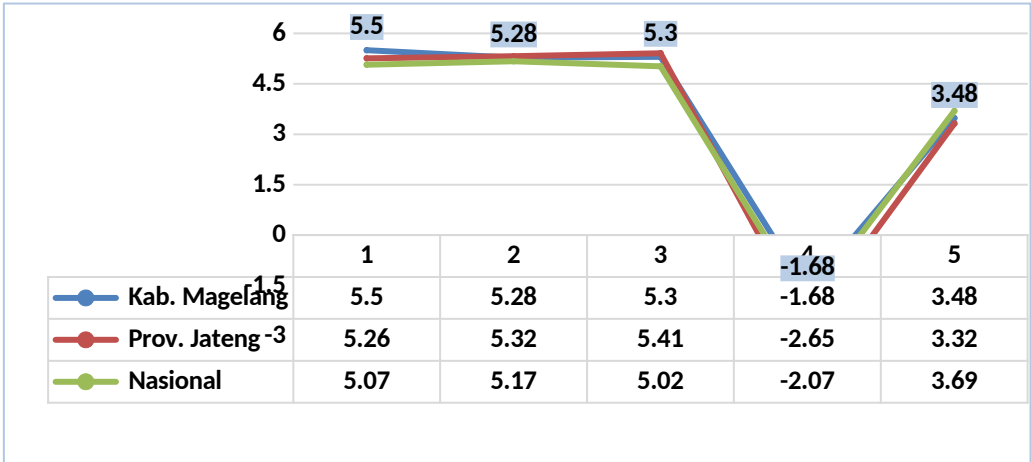
1.3.9 Kondisi Perekonomian

1.3.9.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terwujud atas berbagai proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan ke dalam kenaikan pendapatan wilayah. Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya bisa naik, stagnan atau bahkan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi sumber daya manusia, sumber daya alam, ketersediaan modal, perkembangan teknologi dan kondisi sosial politik.

Dari Tahun 2017 sampai dengan 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang berada pada kisaran 5,28% - 5,5%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Gambar 1.6  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

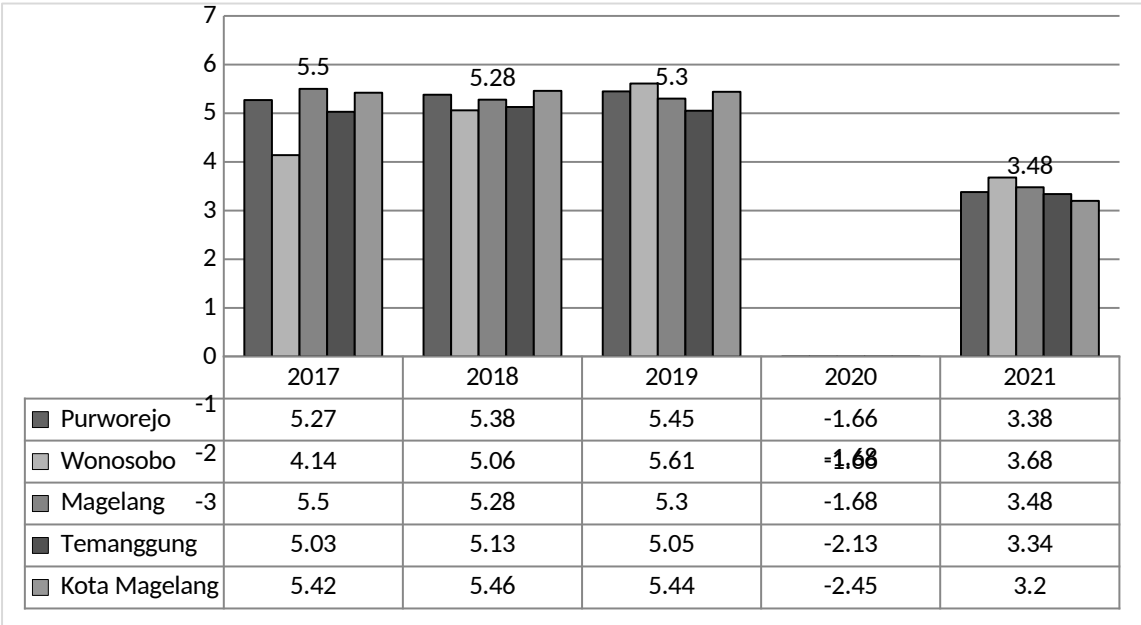


Pada tahun 2020, karena Pandemi Covid pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang mengalami kontraksi sebesar 1,68%, Provinsi Jawa Tengah mengalami Kontraksi sebesar 2,65 %, sedangkan Nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07 %. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang kembali naik pada angka 3,48%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu, mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017. Kota Magelang menikmati pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 dan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019 serta 2021. Setelah pandemi Covid-19, pada tahun 2021 Kabupaten Wonosobo paling cepat bangkit dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68%. Data selengkapnya

disajikan dalam grafik berikut:

Gambar 1.7  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  
se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Prov. Jateng, 2021

Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Magelang mulai bangkit kembali, terutama ditopang sektor industri dan sektor pertanian. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua sektor. Sektor dengan pertumbuhan paling tinggi adalah perdagangan yang tumbuh sebesar 6,95% disusul sektor konstruksi dengan laju pertumbuhan 6,74%. Satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar -1,18%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang yang sebesar 3,48% setahun didongkrak oleh 4 (empat) sektor utama yaitu industri (1,07%), perdagangan (0,73%), konstruksi (0,61%) serta pertanian (0,35%). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.12  
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010  
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,52	2,39	0,79	0,16	0,98
B. Pertambangan dan Penggalian	4,51	3,33	4,74	2,15	4,30
C. Industri Pengolahan	4,88	5,34	6,07	-0,30	4,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	5,39	5,55	1,85	4,65
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,03	5,48	4,40	2,35	4,53
F. Konstruksi	6,47	5,97	4,87	-3,71	6,74
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,38	4,80	5,88	-4,47	6,95
H. Transportasi dan Pergudangan	6,13	6,20	8,55	-26,99	0,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,36	7,27	8,16	-8,00	5,58
J. Informasi dan Komunikasi	13,35	12,77	11,38	15,68	3,88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,98	4,08	3,77	1,65	1,44

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
L. Real Estate	6,50	5,06	5,68	-0,26	2,21
M,N. Jasa Perusahaan	9,30	9,89	9,97	-7,12	2,96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,57	3,05	3,78	-1,22	-1,18
P. Jasa Pendidikan	7,67	8,15	7,58	-0,20	0,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,15	8,68	6,81	8,82	0,21
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,31	9,86	9,25	-6,93	1,11
TOTAL	5,50	5,28	5,30	-1,68	3,48

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 selama tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan dari Rp. 20.974,80 miliar (2017) menjadi Rp. 22.861,15 miliar (2020). Pada Tahun 2021, pasca pandemi covid Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang naik menjadi Rp. 23.661,71 miliar. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.13  
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

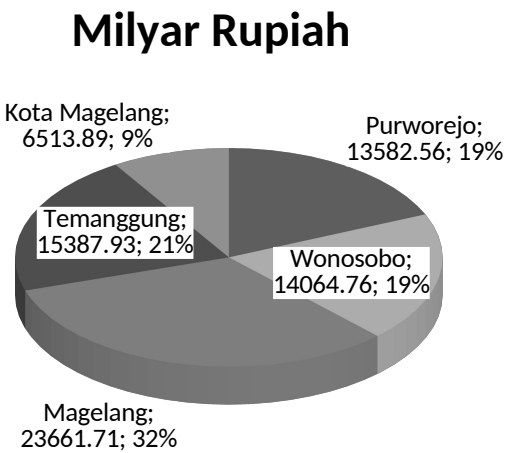
Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.352,89	4.456,86	4.492,19	4.499,15	4.543,25
B. Pertambangan dan Penggalian	809,46	836,42	876,07	894,94	933,40
C. Industri Pengolahan	4.445,15	4.682,71	4.966,92	4.952,26	5.160,44
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12,58	13,26	13,99	14,25	14,91
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,40	21,51	22,46	22,99	24,03
F. Konstruksi	2.027,74	2.148,79	2.253,39	2.169,86	2.316,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.020,27	3.165,17	3.351,23	3.201,37	3.423,88
H. Transportasi dan Pergudangan	825,56	876,76	951,71	694,83	703,17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	876,85	940,61	1.017,36	936,02	988,28
J. Informasi dan Komunikasi	1.014,06	1.143,53	1.273,71	1.473,38	1.530,56
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	572,15	595,50	617,95	628,13	637,19
L. Real Estate	453,89	476,87	503,96	502,64	513,75
M. N Jasa	55,00	60,45	66,47	61,74	63,56

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2017	2018	2019	2020	2021
Perusahaan					
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	716,81	738,66	766,58	757,22	748,27
P. Jasa Pendidikan	1.109,54	1.200,01	1.290,97	1.288,44	1.290,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174,78	189,95	202,89	219,52	219,97
R,S,T,U Jasa Lainnya	487,67	535,74	585,29	544,73	550,79
PDRB	20.974,80	22.082,80	23.253,15	22.861,47	23.661,71

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Magelang tahun 2021 jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu adalah yang terbesar, diikuti Kabupaten Temanggung, berikutnya Kabupaten Wonosobo, kemudian Kabupaten Purworejo dan terakhir Kota Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.8  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2021



PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku pada periode 2017 – 2021 meningkat sebesar Rp.5.992,46 miliar, dari Rp.28.183,85 miliar (2017) menjadi Rp.34.176,31 miliar (2021). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.14  
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021 (Miliar Rupiah)

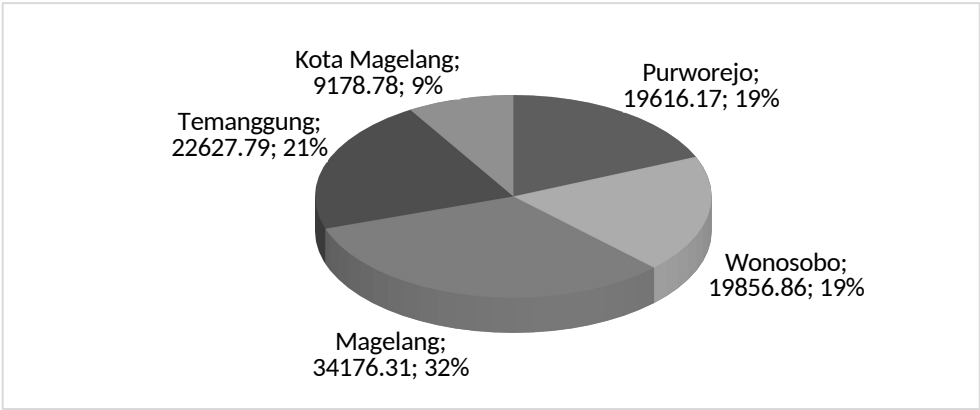
Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.201,99	6.550,44	6.747,26	6.914,81	7.086,93
B. Pertambangan dan Penggalian	1.276,59	1.374,84	1.449,94	1.511,36	1.585,67
C. Industri Pengolahan	6.175,68	6.635,45	7.131,88	7.264,81	7.794,55
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14,28	15,51	16,40	16,60	17,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,96	24,28	25,81	27,93	29,48
F. Konstruksi	2.629,47	2.898,45	3.133,13	3.027,90	3.326,13
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.842,38	4.119,08	4.455,80	4.306,14	4.667,15
H. Transportasi dan Pergudangan	949,30	1.013,87	1.119,98	847,59	888,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.167,42	1.258,72	1.379,38	1.274,04	1.366,00
J. Informasi dan Komunikasi	968,72	1.091,71	1.230,34	1.425,19	1.480,74
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	785,13	844,87	896,65	913,54	959,56
L. Real Estate	527,30	567,59	606,44	608,64	627,97
M,N. Jasa Perusahaan	71,85	81,15	91,95	87,26	90,89
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	997,56	1.039,69	1.098,36	1.100,03	1.076,93
P. Jasa Pendidikan	1.710,40	1.891,21	2.086,41	2.118,82	2.150,59
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	231,38	254,58	276,82	307,86	311,99
R,S,T,U. Jasa Lainnya	611,44	678,01	744,25	702,20	715,80
PDRB	28.183,85	30.339,47	32.490,80	32.454,72	34.176,31

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang tahun 2021 jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu adalah yang terbesar, diikuti Kabupaten Temanggung, berikutnya Kabupaten Wonosobo, kemudian Kabupaten Purworejo dan terakhir Kota Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.9  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota  
se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2021





Dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB (ADHB) tahun 2021, terdapat tiga sektor yang cukup besar kontribusinya yaitu sektor industri pengolahan (22,81%), kemudian pertanian, kehutanan, dan perikanan (20,74%), selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,66%).

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung mengalami penurunan, sementara itu kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan tren meningkat. Pertumbuhan sektor primer terus menurun, sedangkan sektor sekunder dan tersier cenderung naik. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.15  
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021  
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kabupaten Magelang

No.	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,01	20,71	21,59	20,20	20,77	19,32	21,31	19,68	20,74	19,20
2	Pertambangan dan Penggalian	4,53	3,86	4,53	3,79	4,46	3,77	4,66	3,91	4,64	3,94
3	Industri Pengolahan	21,91	21,25	21,87	21,17	21,95	21,36	22,38	21,66	22,81	21,81
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,10	0,08	0,10	0,08	0,10	0,09	0,10	0,09	0,10
6	Konstruksi	9,33	9,69	9,55	9,73	9,96	9,69	9,33	9,49	9,73	9,79
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,63	14,40	13,58	14,34	13,71	14,41	13,27	14,00	13,66	14,47
8	Transportasi dan Pergudangan	3,37	3,95	3,34	3,97	3,45	4,09	2,61	3,04	2,60	2,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	4,19	4,15	4,26	4,25	4,38	3,93	4,09	4,00	4,18
10	Informasi dan Komunikasi	3,44	4,76	3,60	5,18	3,79	5,48	4,39	6,44	4,33	6,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,75	2,78	2,70	2,76	2,66	2,81	2,75	2,81	2,69
12	Real Estate	1,87	2,17	1,87	2,16	1,87	2,17	1,88	2,20	1,84	2,17
13	Jasa Perusahaan	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,54	3,43	3,43	3,35	3,38	3,30	3,39	3,31	3,15	3,16
15	Jasa Pendidikan	6,07	5,28	6,23	5,44	6,42	5,55	6,53	5,64	6,29	5,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,83	0,84	0,86	0,85	0,87	0,95	0,96	0,91	0,93
17	Jasa Lainnya	2,17	2,32	2,23	2,43	2,29	2,52	2,16	2,38	2,09	2,33
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022*

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.992,46 milyar. Meningkat dari Rp. 28.183,85 milyar (2017) menjadi Rp. 34.176,31 milyar (2022).Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.16  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang  
Tahun 2017 - 2021 (Milyar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	20.468,39	21.897,42	23.419,22	23.435,08	23.890,09
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	523,29	576,85	672,08	663,17	691,36
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.383,36	2.581,52	2.649,27	2.534,88	2.608,07
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.707,27	8.887,09	9.655,04	9.120,31	9.891,51
5	Perubahan Inventori	350,35	398,08	320,70	370,98	352,18
	Net Ekspor	-3.248,80	- 4.001,48	- 4.445,51	- 3.662,40	- 3.256,89
	Produk Domestik Regional Bruto	28.183,85	30.339,47	32.497,41	32.462,03	34.176,31

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Demikian juga dengan nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama meningkat sebesar Rp. 2.686,91 milyar dari Rp. 20.974,80 milyar (2017) menjadi Rp. 23.661,71 milyar (2021). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.17  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021 (Milyar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15.007,59	15.647,78	16.376,07	16.146,74	16.334,79
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	351,29	377,31	429,76	417,02	422,42
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.522,58	1.596,62	1.633,21	1.568,62	1.580,64
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.481,95	6.002,23	6.303,16	5.946,33	6.313,79
5	Perubahan Inventori	255,87	325,39	472,86	477,86	338,06
	Net Ekspor	- 1.644,48	- 1.866,54	- 1.961,92	- 1.691,43	- 1.327,98
	Produk Domestik Regional Bruto	20.974,80	22.082,80	23.253,15	22.865,15	23.661,71

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun cenderung fluktuatif, pada tahun 2017 Konsumsi RT sebesar 72,17%, maka pada tahun 2021 Konsumsi RT menjadi sebesar 69,90 %. Demikian juga komponen net export (expor – import) selama lima tahun cenderung fluktuatif, jika pada tahun 2017 komponen net export sebesar -13,19%, pada tahun 2021 komponen net export menjadi sebesar -9,53 %. Pada tahun 2017 komponen PMTB sebesar 27,35 %, pada tahun 2021 komponen PMTB menjadi sebesar 28,94%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.18  
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,62	72,17	72,08	72,21	69,90
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,86	1,9	2,07	2,04	2,02
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,46	8,51	8,15	7,81	7,63
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,35	29,29	29,72	28,10	28,94
5	Perubahan Inventori	1,24	1,31	1,66	1,29	1,03
	Net Ekspor	-11,53	-13,19	-13,68	-11,45	- 9,53
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun cenderung fluktuatif, pada tahun 2017 Konsumsi RT sebesar 71,55% dan pada tahun 2021 Konsumsi RT menjadi sebesar 70,63%. Demikian juga komponen net export (expor – import), jika pada tahun 2017 komponen net export sebesar -7,84%, pada tahun 2021 komponen net export menjadi sebesar -7,41%.

Perkembangan positif terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).Jika pada tahun 2017 komponen PMTB sebesar 26,78%, pada tahun 2021 komponen PMTB menjadi sebesar 26,01%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.19  
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	71,55	70,86	70,43	70,63	70,63
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,67	1,71	1,85	1,82	1,82
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,26	7,23	7,02	6,86	6,86
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,78	27,18	27,11	26,01	26,01
5	Perubahan Inventori	1,22	1,47	2,03	2,09	2,09

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Net Ekspor	-7,84	-8,45	-8,44	-7,41	-7,41
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang tumbuh diatas 5%. Pada tahun 2022, pertumbuhan PDRB sebesar 3,48 %. Untuk selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.20.  
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Komponen_Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,82	4,27	4,65	-1,40	1,16
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,23	7,41	13,9	-2,96	1,29
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,41	4,86	2,29	-3,95	0,77
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,97	9,49	5,01	-5,66	6,18
	PDRB	5,5	5,28	5,3	-1,68	3,48

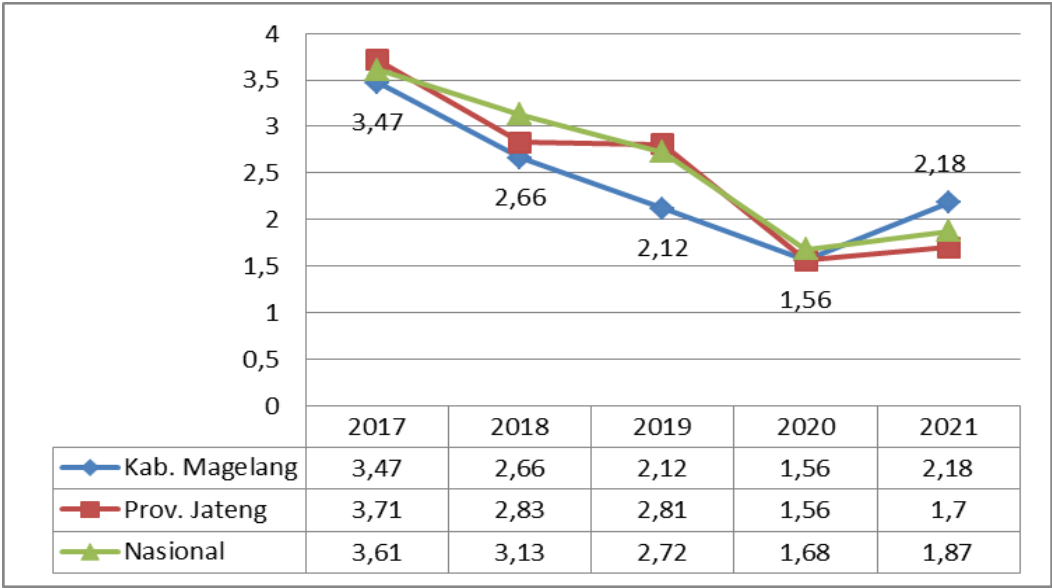
Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

1.3.9.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian disuatu negara dimana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang (kontiniu) disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi. Pada umumnya inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar dimasyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan.

Tren perkembangan inflasi di Kabupaten Magelang dalam lima tahun terakhir lajunya sama dengan kejadian inflasi pada skala nasional dan provinsi. Pada tahun 2021 laju inflasi Kabupaten Magelang sebesar 0,64 %, sama dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan masih sesuai dengan target inflasi tahun 2021, yaitu pada rentang 2,0 – 4,0. Inflasi Kabupaten Magelang pada periode 2017-2021 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.10  
Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)  
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2022

1.3.8 Kondisi Pembangunan Manusia

Kualitas pembangunan manusia secara makro diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Magelang mencapai 70,12 mengalami kenaikan sebesar 1,73 dari tahun 2017 yang sebesar 68,39, dengan rata-rata kenaikan per tahun 0,43.

Indikator dimensi IPM terdiri dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli (pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan). Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.21  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang  
Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2017-2021

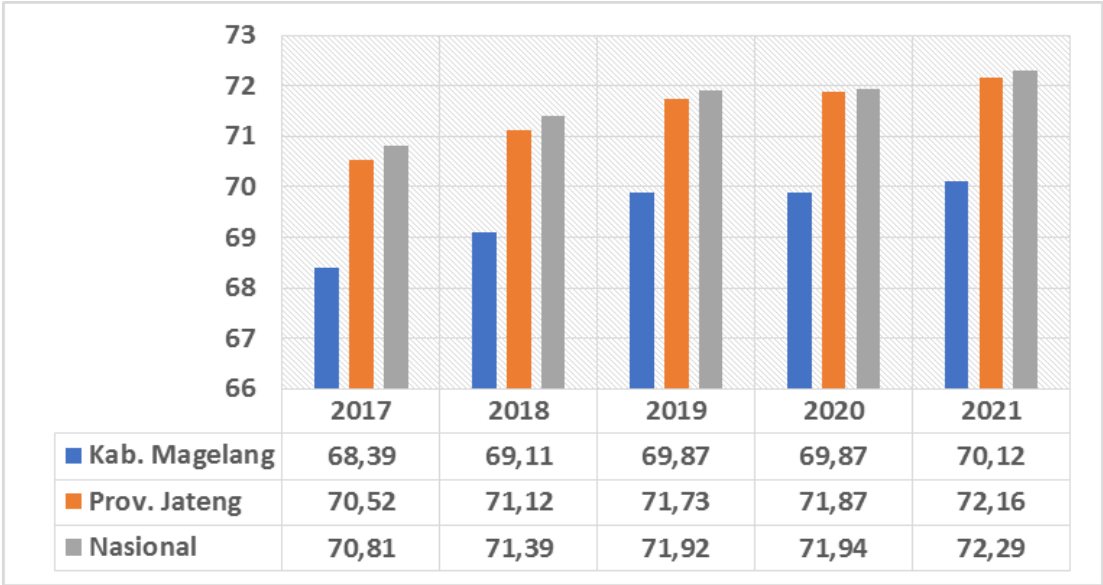
Dimensi/Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,3 9	73,4 7	73,5 6	73,7 2	73,88
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,4 7	12,4 8	12,5 3	12,5 4	12,55
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,41	7,57	7,77	7,78	7,79
Standar Hidup Layak						
Paritas Daya Beli (Pengeluaran riil Per Kapita yang disesuaikan)	Ribu Rp	8.62 7	9.02 5	9.38 7	9.30 1	9.440
IPM Kabupaten Magelang		68,3 9	69,1 1	69,8 7	69,8 7	70,12

Sumber :BPS Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2022

Berdasarkan klasifikasi capaian IPM menurut BPS, IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2017-2020 berada pada status “sedang” (nilai berkisar antara 60 ≤ IPM ≤ 70) dan pada tahun 2021 pada status “tinggi” (nilai berkisar antara 70 ≤ IPM ≤ 80). Walaupun berstatus tinggi, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.11

IPM Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional  
Tahun 2017-2021



Jika disandingkan se-Eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Magelang masih berada di urutan ketiga, di bawah nilai IPM Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.22  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota  
Eks Karesidenan Kedu Tahun 2017-2021

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Purworejo	71,31	71,87	72,50	72,68	72,98
Kabupaten Wonosobo	66,89	67,81	68,27	68,22	68,43
Kabupaten Magelang	68,39	69,11	69,87	69,87	70,12
Kabupaten Temanggung	68,34	68,83	69,56	69,57	69,88
Kota Magelang	77,84	78,31	78,80	78,99	79,43

Sumber :BPS Jawa Tengah Tahun 2022

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, Indeks Pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan, dan Indeks Pengeluaran yang merepresentasikan dimensi standar hidup layak. Rumus IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

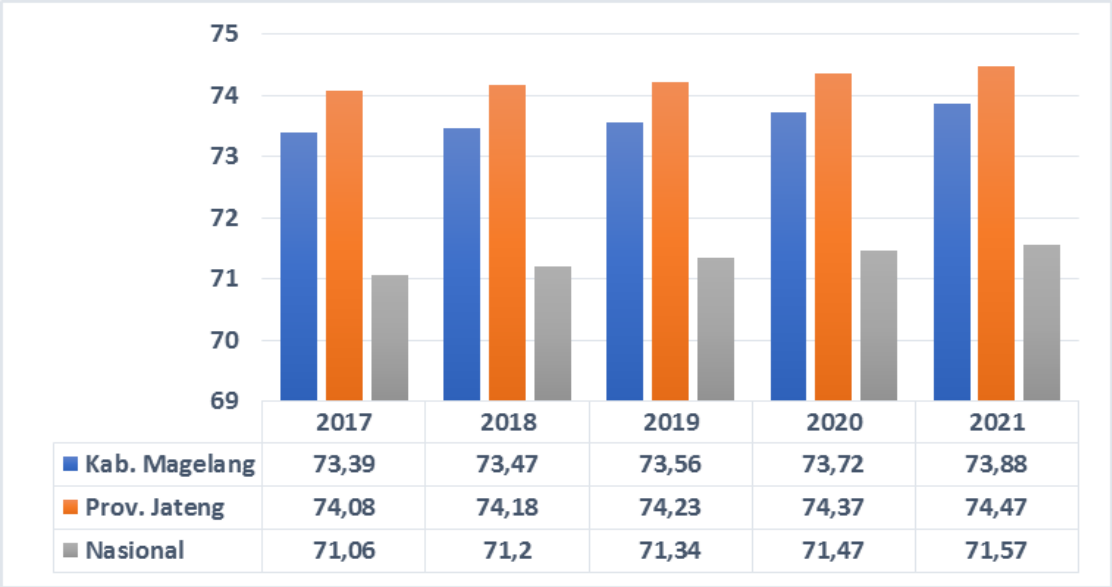
1. Indeks Kesehatan:

Umur Harapan Hidup (UHH)

Pada tahun 2021 UHH Kabupaten Magelang mencapai 73,88 mengalami kenaikan sebesar 0,49 dari tahun 2017 yang sebesar 73,39. Kenaikan UHH ini mengindikasikan adanya keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Pertumbuhan UHH Kabupaten Magelang diatas pertumbuhan UHH Provinsi Jawa Tengah namun masih di bawah pertumbuhan UHH Nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Gambar 1.12  
Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional

Tahun 2017-2021



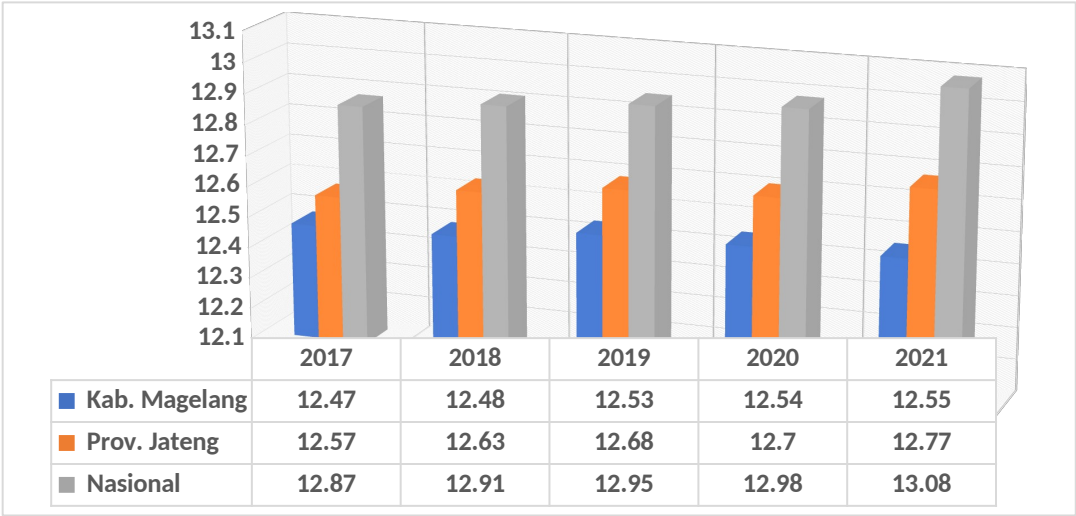
Sumber :BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

2. Indeks Pendidikan

a. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS Kabupaten Magelang pada tahun 2021 sebesar 12,55. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 di Kabupaten Magelang memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,55 tahun atau setara dengan Diploma I. Sejak tahun 2017 HLS Kabupaten Magelang cenderung meningkat, dari sebesar 12,47 (2017) menjadi 12,55 (2021). Harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 lebih rendah dari Provinsi dan Nasional. Berarti bahwa peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu di Kabupaten Magelang lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah dan Nasional.

Gambar 1.13  
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional  
Tahun 2017-2021



Sumber :BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

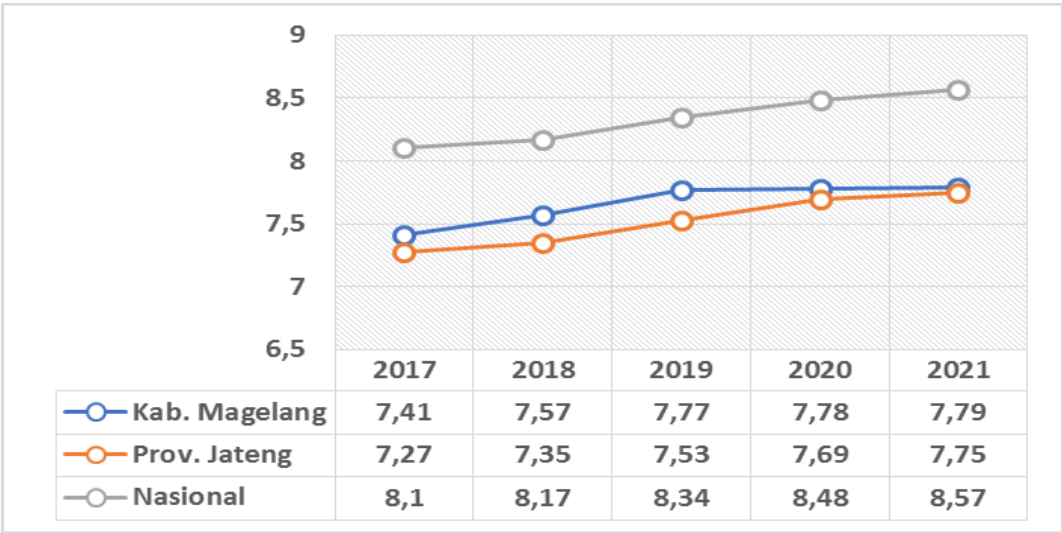
b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tahun 2021 RLS Kabupaten Magelang mencapai 7,79 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,79 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang lebih tinggi daripada Jawa Tengah namun lebih rendah dari Nasional. Data selengkapnya disajikan pada



grafik berikut:

Gambar 1.14  
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional  
Tahun 2017-2021



Sumber :BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

3. Indeks Pengeluaran

Pengeluaran per Kapita Riil yang Disesuaikan

Selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 pengeluaran per kapita riil Kabupaten Magelang meningkat 9,42%. Rata-rata pertumbuhan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang mencapai 2,30% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan Jateng 1,57% per tahun Nasional 1,16% per tahun. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional nilai pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang lebih rendah.

Tabel 1.23  
Pengeluaran Per Kapita Riil (Yang Disesuaikan) Kabupaten Magelang  
Tahun 2017-2021

Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Magelang	8.627	9.025	9.387	9.301	9.440
Provinsi Jawa Tengah	10.377	10.777	11.102	10.930	11.034
Nasional	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga Pelayanan Dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Renaksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar yang

mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dipastikan menjadi isu strategis Daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

- a. penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
- b. penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya; dan
- c. penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II

### KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

#### 2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pihak yang melakukan pelayanan dasar sesuai dengan SPM adalah Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah atau dinas Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan sasaran pelaksanaan pelayanan dasar SPM. PD tersebut adalah:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Rakyat;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perangkat Daerah melakukan pelayanan dasar sesuai SPM yang ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Magelang 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Magelang Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MAGELANG	37.965	33.733	90.70%	182.890	168.937	93.42%	4.915	4.915	100%	245.906.999.942	238.228.973.937

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Magelang Tahun 2023

2.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Magelang Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
MAGELANG	16.064	16.064	99,69%	14.874	15.368	99,92%	14.881	14.873	99,96%	79.528	77.479	97,14%	168.920	160.763	91,95%	844.262	574.207	73,28%	184.861	169.939	88,35%

SPM Bidang Kesehatan															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
394.838	135.309	45,77%	19.634	19.634	100%	3.278	2.428	78,51%	11.595	11,595	100%	18.409	18.409	100%	Rp. 8.440.294595	Rp. 7.564.268.751

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Magelang Tahun 2023

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MAGELANG	1.324.756	1.225.269	93,99	1.324.756	1.212.416	93,22 1	1.326.306.890	1.272.883.185

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Magelang Tahun 2023

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Magelang Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MAGELANG	35	35	100	22	22	100	324.111.434	304.063.886

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Magelang Tahun 2023

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MAGELANG	1,319,476	1,319,476	100%	463.772	463.772	100%	2.922	2,922	100%	21	21	95%	8.593	8.593	100%	19.008.050.250	18.331.921.086

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Magelang Tahun 2023

2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 2.2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Magelang Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
MAGELANG	748	748	100%	20	20	100%	538	538	98,46%	75	75	100%	456	456	100%	3.909.612.280	3.089.645.277

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Magelang Tahun 2023

## 2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Magelang ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

### 2.2.1 Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut:

- a. cakupan wilayah yang luas dan kondisi geografis sebagian wilayah di Kabupaten Magelang yang berbukit-bukit dan bergunung menyebabkan partisipasi masyarakat dalam mengakses Pendidikan kurang optimal;
- b. adanya perubahan indikator pembentuk dan formula pada setiap jenis layanan SPM yang membutuhkan penyesuaian;
- c. nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara SIPD dan Aplikasi SPM berbeda;
- d. mutu kinerja dan kompetensi pendidik masih perlu penguatan, karena persentase pendidik yang memiliki sertifikat Diklat Teknis mengenai ke-PAUD-an relatif rendah;
- e. mutu kinerja dan kompetensi pendidik masih perlu penguatan, karena jumlah pendidik yang mengikuti program Guru Penggerak relatif sedikit;
- f. proporsi PTK penggerak , atau Jumlah guru dan kepala sekolah yang masuk ke dalam program guru penggerak dibagi total guru dan kepala sekolah masih sangat kurang;
- g. proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan atau Persentase pembelanjaan sekolah untuk peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan dibagi total anggaran sekolah dalam satu tahun di bos salur masih rendah; dan
- h. keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran.

### 2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM sebagai berikut:

- a. adanya pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan posyandu balita dan lansia dibatasi;
- b. adanya pandemi covid-19 mengakibatkan sekolah mengadakan pembelajaran secara daring sehingga menyulitkan pelaksanaan screening dan pemeriksaan berkala terhadap peserta didik;
- c. tidak ada pengadaan untuk buku rapot kesehatanku;
- d. tidak ada pengadaan untuk buku Kesehatan lansia;
- e. keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas Kesehatan;
- f. sasaran untuk pelayanan Hipertensi menggunakan estimasi atau proyeksi sehingga sasaran untuk pelayanan cukup tinggi;
- g. kunjungan berobat ke fasilitas kesehatan terkait pelayanan kesehatan penderita hipertensi belum maksimal karena gejala hipertensi terkadang diabaikan atau tidak disadari oleh penderita hipertensi, sehingga kesadaran akan kepatuhan berobat belum maksimal;
- h. Target pelayanan Kesehatan usia produktif sangat tinggi sementara ketersediaan sumber daya manusia dan bahan medis habis pakai (bmhp) terbatas;
- i. Tidak semua sasaran pelayanan kesehatan usia produktif hadir saat jadwal pelaksanaan *screening*;
- j. Pada saat pandemi covid-19 pemeriksaan bakteriologis pada pelayanan Kesehatan TBC terhambat akibat masyarakat tidak mengakses faskes;



- k. TBC memiliki gejala mirip covid-19 sehingga Masyarakat takut untuk berobat; dan
- l. Indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum semua diskreneng kesehatan, karena pada saat pelaksanaan di sekolah masih ada siswa yang sakit, ijin pada saat penjangkaran.

### **2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum**

Penyelenggaraan bidang pekerjaan umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM sebagai berikut:

- a. minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- b. belum terlaksananya secara maksimal proses pengumpulan pendataan, proses evaluasi dan pembinaan dalam penerapan SPM;
- c. kesulitan dalam pendataan Masyarakat yang memiliki akses SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dan Tankiseptik Individual sehingga menggunakan data skunder.
- d. sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- e. kurangnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- f. penetapan sasaran belum berdasarkan data rill (by name by address) tetapi masih menggunakan estimasi sehingga sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan;
- g. minimnya pembiayaan operasional pengelolaan, pemeliharaan dan termasuk SDM pengelola;
- h. minimnya tenaga pengelola teknis kegiatan yang berkompeten dan berkompetensi;
- i. minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan;
- j. belum adanya pelayanan sedot tinja baik bersifat milik pemerintah maupun swasta secara terjadwal dan pola pikir masyarakat masih bersifat penggunaan sarana limbah konvensional; dan
- k. Pemerintah Daerah belum memiliki instalasi pengelolaan lumpur tinja yang aktif sehingga penggunaan sarana air limbah belum sepenuhnya.

### **2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat**

Penyelenggaraan bidang perumahan rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM sebagai berikut:

- a. minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM; dan
- b. kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data.

### **2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**

Penyelenggaraan bidang trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM sebagai berikut:

- a. minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- b. kurangnya sumber daya manusia di lapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- c. kurangnya tenaga penyidik pegawai negeri sipil yang mempengaruhi terhadap kinerja Perangkat Daerah;
- d. belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
- e. belum adanya data tentang jumlah penduduk di Daerah rawan bencana yang memadai termasuk dalam kriteria penduduk miskin; dan
- f. belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

### 2.2.6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM sebagai berikut:

- a. minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- b. belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
- d. belum berjalannya program rehabilitasi sosial secara minimal;
- e. belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh;
- f. keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM;
- g. minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM; dan
- h. kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap sumber daya manusia.

### 2.3. Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam mengatasi permasalahan diatas, tim penerapan SPM Kabupaten Magelang telah melakukan beberapa upaya antara lain:

- a. melaksanakan Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- b. menyelenggarakan rapat rutin tim penerapan SPM Kabupaten Magelang setiap Triwulan untuk memaksimalkan tingkat capaian SPM Kabupaten Magelang;
- c. menyelenggarakan rapat koordinasi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang guna perencanaan dan penganggaran SPM Kabupaten Magelang.

BAB III  
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menerbitkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan Daerah.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/182/KEP/01.01/2023 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magelang Tahun 2023. Dengan adanya Keputusan Bupati tersebut dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan Pelayanan Dasar kepada masyarakat di Lingkungan Kabupaten Magelang.

3.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Magelang bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Pendidikan Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tamping layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini disetiap desa	
			5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tamping	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	6	Penyediaan Pendidikan layanan di wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
			1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	Kegiatan
				Pemetaan dan penataan penempatan untuk Pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan Tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan Pendidikan dan pelatihan Calon pengawas sekolah/ Lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan Tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan Kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
2.	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
			1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)	2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
			1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/ MTs/Paket A/Paket B)	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk	Pendidik dan tenaga

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)		pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
			1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
3.	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah terdepan terluar dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan	Kegiatan



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)		pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	
			1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	

3.2.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orang
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolusis	Orang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi Bencana	Dokumen

3.2.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/ peningkatan/perluasan/ perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tariff air minum	Penyelengga ra SPAM
			10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi penyiapan kerjasama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelengga ra SPAM
			15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	Unit
			16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	Unit
			17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Unit
			21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit
2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam Daerah	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan airlimbahdomestik terpusat skala kota	Dokumen
			3	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	
			6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kelompok
			9	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	Unit
			10	Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	M <sup>2</sup> /hari
			11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	M <sup>2</sup> /hari
			12	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Orang
			13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit
			14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasanana IPLT	Rumah Tangga
			17	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/ Perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen

3.2.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pengembangan perumahan	Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			2	Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4	Pendataanm tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen
			3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Unit Rumah
			6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

3.2.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum. Dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah	1	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus
			2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Dokumen
			4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang
			6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit
			8	Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	1	Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	Laporan
			2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan
			3	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
2.	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang
			1	Penyusunan rencana Penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	Orang
			3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten	Dokumen
			4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
			5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen
			6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
			7	Penanganan pasca bencana kabupaten	
			8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat bencana kabupaten	Orang
			9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
			10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
			11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen
			12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan
			2	Respon cepat darurat bencana kabupaten	Dokumen
			3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan
			6	Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit	Dokumen
		Kegiatan penataan	1	Penyusunan regulasi	Dokumen



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		sistem dasar penanggulangan bencana		penanggulangan bencana kabupaten	
			2	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Dokumen
			3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			4	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
			6	Penanganan pasca bencana kabupaten	Dokumen
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah	1	Pencegahan kebakaran dalam Daerah kabupaten	Dokumen
			2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah kabupaten	Dokumen
			3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
			4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten	Dokumen
			5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Unit
			6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Dokumen
			7	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan	Unit
			9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar Daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang
			10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen
		Kegiatan inspeksi Peralatan proteksi kebakaran	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
			2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
		Kegiatan investigasi kejadian kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
		Kegiatan	1	Pemberdayaan masyarakat	Orang



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	
			2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa/ Kelurahan
			3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam Kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan
			2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Unit
			4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Laporan

3.2.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1	Penyediaan permakanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan alat bantu	Orang
			4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
			6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Orang
			8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				dasar	
			9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
2.	Program Penanganan Bencana	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	1	Penyediaan makanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5	Pelayanan dukungan psikososial	Orang

3.3 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Magelang 2024-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Indikasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Indikasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Indikasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten / Kota																										
1	Pendidikan Anak Usia Dini			38.206	33.643			27,154,161,952		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud	38.206	38.206			28,154,161,952		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	DISDI KBUD	38.206	38.206			29,154,161,952		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
a	Angka partisipasi sekolah	%				100	90.08	3.017.129.105		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			100	100	3,128,240,216		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			100	100	3,239,351,328		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
b	Angka Partisipasi Murni	%	78.22			100	88.63	3.017.129.105		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			100	100	3,128,240,216		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			100	100	3,239,351,328		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
c	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal	%	73.19			82.53	82.5	3.017.129.105		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			82.53	82.53	3,128,240,216		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			82.53	82.53	3,996,329,477		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 20	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	akreditasi B																										
d	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%				76.39	75.39	3.017.129.105		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			76.39	75.39	3,128,240,216		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			76.39	75.39	3,996,329,477		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
e	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%				3.5	3.5	3.017.129.105		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			3.5	3.5	3,128,240,216		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			3.5	3.5	3,996,329,477		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
f	Kecukupan formasi guru ASN	%				8.99	8.99	3.017.129.105		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			8.99	8.99	3,128,240,216		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			8.99	8.99	3,996,329,477		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
g	Indeks Distribusi Guru	%	48.2			0.76	0.76	3.017.129.105		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			0.76	0.76	3,814,678,137		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			0.76	0.76	3,996,329,477		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
h	Proporsi PTK bersertifikat	%				59.04	59.04	3.017.129.105		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			59.04	59.04	3,814,678,137		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			59.04	59.04	3,996,329,477		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
i	Proporsi PTK penggerak	%				7.48	7.48	3.017.129.105		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			7.48	7.48	3,814,678,137		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			7.48	7.48	3,996,329,477		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
2	Pendidikan			181417	1674			153,761,518		DAU, DAK FISIK, DAK	Disdik	182	168			163,984,443		DAU, DAK FISIK, DAK	Disdik	182	168			171,793,226		DAU, DAK FISIK, DAK	Disdik

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 20	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Dasar				17			,514		NON FISIK	bud	,890	,937			,156		NON FISIK	bud	,890	,937			,164		NON FISIK	bud
	SD							82,863,306,371		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud					87,849,941,910		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud					92,033,272,477		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
a	Angka partisipasi kasar	%	90.8			100.00	91.94	6,374,107,413		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			100.00	100.00	6,757,687,839		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			100.00	100.00	7,079.482.498		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
b	Angka partisipasi sekolah	%	99.79			100.00	91.94	6,374,107,413		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			100.00	100.00	6,757,687,839		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			100.00	100.00	7,079.482.498		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
c	Kemampuan literasi	Nilai	82.72			100.00	99.53	6,374,107,413		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			69.89	68.06	6,757,687,839		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			69.89	68.06	7,079.482.498		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
d	Kemampuan numerasi	Nilai	66.43			69.89	68.06	6,374,107,413		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			55.06	53.18	6,757,687,839		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			55.06	53.18	7,079.482.498		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
e	Perbedaan skor literasi	Nilai	3.84			55.06	53.18	6,374,107,413		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			4.17	4.17	6,757,687,839		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			4.17	4.17	7,079.482.498		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
f	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2.14			4.17	4.17	6,374,107,413		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			1.85	1.85	6,757,687,839		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			1.85	1.85	7,079.482.498		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
g	Indeks iklim keamanaan	Nilai	71.15			1.85	1.85	6,374,107,413		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			78.23	75.01	6,757,687,839		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			78.23	75.01	7,079.482.498		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
h	Indeks	Nilai	71.			78.23	75.01	6,374,107,41		DAU, DAK FISIK, DAK	Disdik			76.6	76.1	6,757,687,83		DAU, DAK FISIK, DAK	Disdik			76.6	76.1	7,079.482.49		DAU, DAK FISIK, DAK	Disdik

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 20	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	iklim kebin ekaan	ai	62					3		NON FISIK	bud					9		NON FISIK	bud					8		NON FISIK	bud
i	Indeks iklim inklusivitas	Nilai				76.6	76.1	6,374,107,413		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			63.16	57.95	6,757,687,839		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			63.16	57.95	7.079.482.498		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
j	Kecukupan formasi guru ASN	%	50			63.16	57.95	6,374,107,413		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			8.99	8.99	6,757,687,839		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			8.99	8.99	7.079.482.498		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
k	Indeks Distribusi Guru	%	0,36			8.99	8.99	6,374,107,413		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			0.38	0.38	6,757,687,839		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			0.38	0.38	7.079.482.498		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
l	Proporsi PTK berse rtifikat	%	94			0.38	0.38	6,374,107,413		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			37.97	37.97	6,757,687,839		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			37.97	37.97	7.079.482.498		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
m	Proporsi PTK peng gerak	%				37.97	37.97	6,374,107,413		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			69.89	68.06	6,757,687,839		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			69.89	68.06	7.079.482.498		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
	SMP							70,898,212,143		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud					76,134,501,246		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud					79,759,953,687		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
a	Angka partisipasi kasar	%	103.06			100	106.03	5.908.184.345		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			100.00	100.00	5,856.500.095		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			100.00	100.00	6.135.381.052		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud
b	Angka parti	%	97.6			100	95.43	5.908.184.345		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			100.00	100.00	5,856.500.095		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud			100.00	100.00	6.135.381.052		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdik bud

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 20	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	sipasi sekolah		9											0								0					
c	Kemampuan literasi	Nilai	86,15			79,85	78,64	5.908.184.345		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			79,85	78,64	5,.856.500.095		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			79,85	78,64	6.135.381.052		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
d	Kemampuan numerasi	Nilai	65,26			75,49	68,79	5.908.184.345		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			75,49	68,79	5,.856.500.095		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			75,49	68,79	6.135.381.052		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
e	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,53			3,29	3,29	5.908.184.345		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			3,29	3,29	5,.856.500.095		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			3,29	3,29	6.135.381.052		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
f	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,39			1,54	1,54	5.908.184.345		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			1,54	1,54	5,.856.500.095		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			1,54	1,54	6.135.381.052		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
g	Indeks iklim keamanaan	Nilai	69,19			75,84	71,17	5.908.184.345		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			75,84	71,17	5,.856.500.095		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			75,84	71,17	6.135.381.052		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
h	Indeks iklim kebinnekaan	Nilai	69,07			77,12	74,53	5.908.184.345		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			77,12	74,53	5,.856.500.095		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			77,12	74,53	6.135.381.052		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
i	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	-			63,05	59,13	5.908.184.345		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			63,05	59,13	5,.856.500.095		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			63,05	59,13	6.135.381.052		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
j	Kecukupan informasi	%				2,81	2,81	5.908.184.345		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			2,81	2,81	5,.856.500.095		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			2,81	2,81	6.135.381.052		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 20	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layan an	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	guru ASN																										
k	Indeks Distribusi Guru	%	0,34			0.37	0.37	5.908.184.345		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			0.37	0.37	5,856.500.095		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			0.37	0.37	6.135.381.052		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
l	Proporsi PTK berse rtifikat	%	91,3			50.14	50.14	5.908.184.345		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			50.14	50.14	5,856.500.095		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			50.14	50.14	6.135.381.052		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
m	Proporsi PTK peng gerak	%				0	0			DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			0.09	0.09	5,856.500.095		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			0.09	0.09	6.135.381.052		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
3	Pendidikan Kesetaraan			7395	7395			7,604,966,569		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud	4,915	4,915			7,859,415,086		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud	4,915	4,915			8,233,672,948		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
a	Angka partisipasi kasar	%				-	-							-	-							-	-				
b	Angka partisipasi sekolah	%				100	22.24	950.620.821		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			100	100	982.426.885		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			100	100	1.029.209.118		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
c	Kemampuan literasi	Nilai	71,26			70.78	70.78	950.620.821		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			70.78	70.78	982.426.885		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			70.78	70.78	1.029.209.118		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
d	Kemampuan numerasi	Nilai	55,47			57.03	57.03	950.620.821		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			57.03	57.03	982.426.885		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			57.03	57.03	1.029.209.118		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 20	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutualayan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutualayan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutualayan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
e	Perbedaan skor literasi	Nilai	5,16			5.27	5.27	950.620.821		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			5.27	5.27	982.426.885		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			5.27	5.27	1.029.209.118		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
f	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3,22			4.52	4.52	950.620.821		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			4.52	4.52	982.426.885		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			4.52	4.52	1.029.209.118		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
g	Indeks iklim keamanaan	Nilai	65,38			67.96	67.96	950.620.821		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			67.96	67.96	982.426.885		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			67.96	67.96	1.029.209.118		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
h	Indeks iklim kebinnekaan	Nilai	65,28			62.26	62.26	950.620.821		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			62.26	62.26	982.426.885		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			62.26	62.26	1.029.209.118		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
i	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	-			54.98	54.98	950.620.821		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			54.98	54.98	982.426.885		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud			54.98	54.98	1.029.209.118		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	Disdikbud
j	Kecukupan formasi guru ASN	%				-	-							-	-							-	-				
k	Indeks Distribusi Guru	%				-	-							-	-							-	-				
l	Proporsi PTK bersektifikat	%				-	-							-	-							-	-				
m	Propo	%																									

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 20	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
n	rsi PTK penggerak					-	-							-	-							-	-				
	Pengalaman pelatihan guru	%				-	-							-	-							-	-				
	PTK (Keg. Lainnya)							23.881.312.024		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	DISDI KBUD					22,335,577,508		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK						22,335,577,508		DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK	

Tabel 3.2.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Magelang 2024-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten /Kota																										
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	16.064	14.391	13.443			2,000,858,918		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	16.967	16.967			2,000,858,918		APBD Murni ,DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	16.967	16.967			2,000,858,918		APBD Murni,DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	17.538			14.391	14.114	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.354	16.354	117.697.583		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.354	16.354	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
b	Tablet tambah darah	Tablet	16.059			2.590.380	1.124.786	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.967	16.967	117.697.583		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.967	16.967	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																										Hasil	
c	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	15.954			14.391	14.004	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.967	16.967	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.967	16.967	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
d	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	16.064			14.391	14.024	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.967	16.967	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.967	16.967	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
e	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	16.064			14.391	14.024	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.967	16.967	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.967	16.967	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
f	Alat	Paket	16.			14.3	14.0	117.69		APBD	Din			16.9	16.9	117.69		APBD	Dink			16.9	16.96	117.6		APBD	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana										
				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran													
																												Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
	deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin		006			91	08	7.583		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	kes			67	67	7.583		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	es			67	7	97.583		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil											
g	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket				14.391	14.114	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.967	16.967	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.967	16.967	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
h	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	16.064			14.391	14.024	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.967	16.967	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.967	16.967	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
i	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	16.064			14.391	14.024	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.967	16.967	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			16.967	16.967	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
j	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				617	617	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			617	617	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			617	617	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
k	Gel USG	Botol				1.481	1.481	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.481	1.481	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.481	1.481	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
1	Tenaga	Orang	113			301	301	117.69		APBD	Din			301	301	117.69		APBD	Dink			301	301	117.6		APBD	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;							7.583		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	kes					7.583		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	es					97.583		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
m	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	590			1.116	1.116	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
n	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	698			749	749	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			749	749	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			749	749	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
o	Tenaga kesehatan	Orang				457	457	117.697.583		APBD Murni,	Dinkes			457	457	117.697.583		APBD Murni	Dinkes			457	457	117.697.583		APBD Murni	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	: Tenaga Kefarmasian									DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil								, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil						3		i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
p	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				70	70	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70	70	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70	70	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
q	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang				14.391	12.416	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			14.391	12.416	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			14.391	12.416	117.697.583		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
2	Pelayanan Kesehatan Ibu		14.874	13.731	13.212			672,491,129		APBD Murni, DAK	Dinkes	15.833	15.833			672,491,129		APBD Murni, DAK	Dinkes	15.833	15.833			672,491,129		APBD Murni,	Dinkes



NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Bersalin									Non Fisik, Dana Bagi Hasil								Non Fisik, Dana Bagi Hasil								DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
a	Formulir Partograf	Formulir	14.571			13731	13212	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.833	15.833	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.833	15.833	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
b	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	14.571			13731	13212	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.833	15.833	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.833	15.833	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	14.571			13731	13212	74.721.236		APBD Murni, DAK Non	Dinkes			15.833	15.833	74.721.236		APBD Murni, DAK Non	Dinkes			15.833	15.833	74.721.236		APBD Murni, DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Fisik, Dana Bagi Hasil								Fisik, Dana Bagi Hasil								Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
d	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				29	29	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
e	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	113			301	301	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			301	301	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			301	301	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
f	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	590			749	749	74.721.236		APBD Murni, DAK Non	Dinkes			749	749	74.721.236		APBD Murni, DAK Non	Dinkes			749	749	74.721.236		APBD Murni, DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana										
				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran													
																												Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
										Fisik, Dana Bagi Hasil								Fisik, Dana Bagi Hasil								Non Fisik, Dana Bagi Hasil											
g	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	698			1.116	1.116	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
h	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				457	457	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			457	457	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			457	457	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
i	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				70	70	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana	Dinkes			70	70	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana	Dinkes			70	70	74.721.236		APBD Murni, DAK Non Fisik,	Dinkes										

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			

1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Bagi Hasil								Bagi Hasil								Dana Bagi Hasil	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		14.873	13.193	13.193			847,030,888		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	15.399	15.399			847,030,888		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	15.399	15.399			847,030,888		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
a	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	17.907			13.193	13.193	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.399	15.399	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.399	15.399	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
b	Vitamin K1 injeksi	Ampul	14.881			13.193	13.130	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.399	15.399	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.399	15.399	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																										Hasil APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
c	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	14.881			13.193	13.130	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.399	15.399	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.399	15.399	60.502.206		Hasil APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
d	Formulir bayi baru lahir	Formulir	14.881			13.193	13.193	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.399	15.399	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.399	15.399	60.502.206		Hasil APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir	14.881			39.576	39.483	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.399	15.399	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.399	15.399	60.502.206		Hasil APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	14.881			13.193	13193	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.399	15.399	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			15.399	15.399	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
g	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				29	29	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
h	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	112			301	301	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			301	301	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			301	301	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana										
				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran													
																												Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
i	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	590			749	749	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			749	749	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			749	749	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
j	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	698			1.116	1.116	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
k	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				457	457	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			457	457	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			457	457	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
1	Tenaga	Orang				36	36	60.502		APBD	Din			36	36	60.502		APBD	Dink			36	36	60.50		APBD	Dinkes										

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana										
				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran													
																												Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
	kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku							.206		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	kes					.206		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	es					2.206		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil											
m	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				70	70	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70	70	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70	70	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
n	Kader Kesehatan	Orang				14.081	14.081	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			14.081	14.081	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			14.081	14.081	60.502.206		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
4	Pelayanan		77.	75.0	75.			45,842		APBD	Din	86.6	86.6			45,842		APBD	Dink	86.	86.6			45,84		APBD	Dinkes										



NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana									
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran												
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36									
	Kesehatan Balita		479	02	002			,640		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	kes	37	37			,640		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	es	637	37			2,640		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil										
a	Kuisiонер Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	77.479			15.730	15.730	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			86.637	86.637	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			86.637	86.637	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes									
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	77.479			75.002	72.021	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			86.637	86.637	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			86.637	86.637	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes									
c	Buku Kartu Ibu	Orang	77.479			75.002	75.002	2.182.982		APBD Murni,	Dinkes			86.637	86.637	2.182.982		APBD Murni	Dinkes			86.637	86.637	2.182.982		APBD Murn	Dinkes									

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	dan Anak (KIA)									DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil								, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil								i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
d	Vitamin A Biru	Kapsul	13.937			11.623	11.623	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			7.698	7.698	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			7.698	7.698	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
e	Vitamin A Merah	Kapsul	64.279			63.957	63.957	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			65.753	65.753	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			65.753	65.753	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
f	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	18.012			16.462	16.462	2.182.982		APBD Murni, DAK Non	Dinkes			16.462	16.462	2.182.982		APBD Murni, DAK Non	Dinkes			16.462	16.462	2.182.982		APBD Murni, DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana								
				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran											
																												Layanan	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36								
										Fisik, Dana Bagi Hasil								Fisik, Dana Bagi Hasil								Non Fisik, Dana Bagi Hasil									
g	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	16.872			70.458	70.458	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70.458	70.458	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70.458	70.458	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes								
h	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	16.872			34.876	34.876	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			34.876	34.876	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			34.876	34.876	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes								
i	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	15.237			52.689	52.689	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana	Dinkes			52.689	52.689	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana	Dinkes			52.689	52.689	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik,	Dinkes								

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Bagi Hasil								Bagi Hasil								Dana Bagi Hasil	
j	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	15.560			17.897	17.897	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			17.897	17.897	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			17.897	17.897	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
k	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	15.670			19.895	19.895	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			19.895	19.895	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			19.895	19.895	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
l	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	15.670			19.895	19.895	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			19.895	19.895	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			19.895	19.895	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																										Hasil	
m	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit				232.172	232.172	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			232.172	232.172	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			232.172	232.172	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
n	Peralatan Anafilaktik	Paket	15.560			29	29	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
o	Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	18.025			12	12	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			12	12	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			12	12	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
p	Tenaga	Orang	18.			289	289	2.182.		APBD	Din			289	289	2.182.		APBD	Dink			289	289	2.182		APBD	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	medis : Dokter		025					982		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	kes					982		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	es					.982		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
q	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	165.503			749	749	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			749	749	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			749	749	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
r	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	116			1.116	1.116	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
s	Tenaga kesehatan : Tenaga	Orang	107			70	70	2.182.982		APBD Murni, DAK	Dinkes			70	70	2.182.982		APBD Murni, DAK	Dinkes			70	70	2.182.982		APBD Murni,	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Gizi									Non Fisik, Dana Bagi Hasil								Non Fisik, Dana Bagi Hasil								DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
t	Guru PAUD	Orang	590			2.258	2.258	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			2.258	2.258	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			2.258	2.258	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
u	Kader Kesehatan	Orang	698			14.081	14.081	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			14.081	14.081	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			14.081	14.081	2.182.982		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		160.763	169.354	169.354			383,420,540		APBD Murni, DAK Non Fisik,	Dinkes	169.354	169.354			383,420,540		APBD Murni, DAK Non Fisik,	Dinkes	169.354	169.354			383,420,540		APBD Murni, DAK Non	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Dana Bagi Hasil								Dana Bagi Hasil								Fisik, Dana Bagi Hasil	
a	Form pencatatan /buku rapor kesehatanku	Buku	12.402			169.354	169.354	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			169.354	169.354	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			169.354	169.354	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
b	Form pencatatan /buku pemantauan kesehatan	Buku	12.402			1.416	1.416	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.416	1.416	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.416	1.416	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
c	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	57.423			169.354	169.354	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			169.354	169.354	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			169.354	169.354	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes



NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Hasil								Hasil								Bagi Hasil	
d	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	1.127			1508	1508	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1508	1508	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1508	1508	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	285			60	60	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			60	60	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			60	60	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
f	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan	Tablet				154.685	154.685	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi	Dinkes			154.685	154.685	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi	Dinkes			154.685	154.685	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	usia 12-17 tahun diluar sekolah									Hasil								Hasil								Bagi Hasil	
g	Alat Pemeriksaa n Hb	Alat				67	67	21.301 .141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			67	67	21.301 .141		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			67	67	21.30 1.141		APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
h	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip				8.78 6	8.78 6	21.301 .141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			8.78 6	8.78 6	21.301 .141		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			8.78 6	8.786	21.30 1.141		APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
i	Media promosi kesehatan	Paket				29	29	21.301 .141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi	Dinkes			29	29	21.301 .141		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi	Dinkes			29	29	21.30 1.141		APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Hasil								Hasil								Bagi Hasil	
j	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin				18.203	18.203	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			18.203	18.203	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			18.203	18.203	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
k	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	150			390	390	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			390	390	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			390	390	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
l	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	590			749	749	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			749	749	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			749	749	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Hasil								Hasil								Bagi Hasil	
m	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	698			1.116	1.116	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	21.301.141		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
n	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	58			70	70	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70	70	21.301.141		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70	70	383,420,540		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
o	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				457	457	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			457	457	21.301.141		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			457	457	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana										
				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran													
																												Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
p	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	36			76	76	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			76	76	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			76	76	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
q	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	14.875			7.493	7.493	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			7.493	7.493	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			7.493	7.493	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
r	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader	Orang	7.562			314	314	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			314	314	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			314	314	21.301.141		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kesehatan /dokter kecil/peer conselor																										
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		574.207	639.284	639.284			107,767,385		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	1.129.901	1.129.901			107,767,385		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	1.129.901	1.129.901			107,767,385		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
a	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	58			29	29	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			58	58	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			58	58	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
b	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit				323	323	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi	Dinkes			372	372	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi	Dinkes			372	372	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Hasil								Hasil								Bagi Hasil	
c	Alat : Tensi meter	Unit	303			323	323	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			372	372	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			372	372	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
d	Alat : Glukometer	Unit	303			323	323	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			372	372	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			372	372	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
e	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	303			29	29	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			372	372	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			372	372	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana									
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran												
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36									
f	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	303			639.284	639.284	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			639.284	639.284	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			639.284	639.284	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes									
g	Alat : KIT IVA Tes	Unit	303			29	29	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes									
h	Strip dan Reagen pemeriksaa n Hb	Unit	574.207			29	29	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes									
i	Kit Opthalmol	Unit	574.20			29	29	5.671.967		APBD Murni,	Dinkes			29	29	5.671.967		APBD Murni	Dinkes			29	29	5.671.967		APBD Murn	Dinkes									



NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	ogi Komunitas		7							DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil								, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil								i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
j	Kuesioner PUMA	Dokumen	574.207			580	580	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			580	580	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			580	580	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
k	Alat Pelayanan KB	Unit	29			60	60	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			60	60	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			60	60	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
l	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	574.207			29	29	5.671.967		APBD Murni, DAK Non	Dinkes			29	29	5.671.967		APBD Murni, DAK Non	Dinkes			29	29	5.671.967		APBD Murni, DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)									Fisik, Dana Bagi Hasil								Fisik, Dana Bagi Hasil								Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
m	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul				225.134	225.134	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			225.134	225.134	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			225.134	225.134	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
n	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	29			289	289	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			289	289	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			289	289	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
o	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	29			749	749	5.671.967		APBD Murni, DAK Non	Dinkes			749	749	5.671.967		APBD Murni, DAK Non	Dinkes			749	749	5.671.967		APBD Murni, DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Fisik, Dana Bagi Hasil								Fisik, Dana Bagi Hasil								Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
p	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	29			1.166	1.166	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.166	1.166	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.166	1.166	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
q	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	29			70	70	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70	70	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70	70	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
r	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	29			76	76	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana	Dinkes			76	76	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana	Dinkes			76	76	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik,	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Bagi Hasil								Bagi Hasil								Dana Bagi Hasil	
s	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2457			4.937	4937	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			4.937	4.937	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			4.937	4.937	5.671.967		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		169.939	172.603	172.603			45,811,560		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	178.623	178.623			45,811,560		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	178.623	178.623			45,811,560		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
a	Alat pemeriksaaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat	Paket	102.250			372	372	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			372	372	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			372	372	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana										
				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran													
																												Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
	ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter																								Hasil												
b	Glukometer/alat pemeriksaa n gula darah	Paket	56.847			460	460	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			460	460	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			460	460	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
c	Alat pemeriksaa n kolesterol	Paket	3215			407	407	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			407	407	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			407	407	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
d	Bahan medis Habis Pakai: strip	Paket				172.603	160.461	3.523.966		APBD Murni, DAK Non	Dinkes			172.603	160.461	3.523.966		APBD Murni, DAK Non	Dinkes			172.603	160.461	3.523.966		APBD Murni, DAK	Dinkes										

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	uji pemeriksaa n gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol									Fisik, Dana Bagi Hasil								Fisik, Dana Bagi Hasil								Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
e	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket				172.603	153.667	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			172.603	153.667	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			172.603	153.667	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
f	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku				172.603	1.000	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi	Dinkes			172.603	1.000	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi	Dinkes			172.603	1.000	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Hasil								Hasil								Bagi Hasil	
g	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				29	29	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
h	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	107			289	289	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			289	289	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			289	289	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
i	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	590			749	749	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			749	749	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			749	749	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana									
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran												
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36									
j	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	698			1.116	1.116	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	3.523.966		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes									
k	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	58			70	70	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70	70	3.523.966		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70	70	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes									
l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36			76	76	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			76	76	3.523.966		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			76	76	3.523.966		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes									
m	Kader kesehatan	Orang	2352			14.081	14.081	3.523.966		APBD Murni,	Dinkes			14.081	14.081	3.523.966		APBD Murni	Dinkes			14.081	14.081	3.523.966		APBD Murn	Dinkes									



NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu									DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil								, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil								i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		135.309	190.548	190.548			50,278,904		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	190.548	190.548			50,278,904		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	190.548	190.548			50,278,904		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	58			58	58	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			58	58	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			58	58	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
b	Obat Hipertensi	Paket				2.286.576	2.286.576	4.189.908		APBD Murni, DAK	Dinkes			2.286.576	2.286.576	4.189.908		APBD Murni, DAK	Dinkes			2.286.576	2.286.576	4.189.908		APBD Murni,	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Non Fisik, Dana Bagi Hasil								Non Fisik, Dana Bagi Hasil								DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
c	Tensimeter	Unit	303			29	29	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
d	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiak u (ASIK)	Aplikasi	2			29	29	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan	Paket				29	29	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik,	Dinkes			29	29	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik,	Dinkes			29	29	4.189.908		APBD Murni, DAK Non	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Edukasi (KIE)									Dana Bagi Hasil								Dana Bagi Hasil								Fisik, Dana Bagi Hasil	
f	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	29			289	289	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			289	289	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			289	289	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	29			749	749	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			749	749	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			749	749	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	29			1.116	1116	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1116	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1116	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Hasil								Hasil								Bagi Hasil	
i	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				70	70	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70	70	4.189.908		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70	70	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
j	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	29			36	36	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			36	36	4.189.908		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			36	36	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
k	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang				457	457	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			457	457	4.189.908		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			457	457	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				76	76	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			76	76	4.189.908		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			76	76	4.189.908		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		19.634	20.400	20.400			2,077,999,738		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	23.751	23.751			2,077,999,738		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	23.751	23.751			2,077,999,738		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
a	Obat Diabetes Melitus	Paket	303			244.800	244.800	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			244.800	244.800	173.166.644		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			244.800	244.800	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
b	Fotometer atau	Unit	19.634			29	29	173.166.644		APBD Murni,	Dinkes			29	29	173.166.644		APBD Murni	Dinkes			29	29	173.166.64		APBD Murn	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Glukometer									DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil								, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil						4		i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
c	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	19.634			20.400	20.400	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			20.400	20.400	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			20.400	20.400	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
d	Formulir pencatatan dan	Formulir				29	29	173.166.644		APBD Murni, DAK	Dinkes			29	29	173.166.644		APBD Murni, DAK	Dinkes			29	29	173.166.644		APBD Murni,	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana										
				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran													
																												Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
	pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiak u), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas )									Non Fisik, Dana Bagi Hasil								Non Fisik, Dana Bagi Hasil								DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil											
e	Media Promosi Komunikasi dan Edukasi (KIE)	Paket	19.634			29	29	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
f	Tenaga	Orang	19.			289	289	173.16		APBD	Din			289	289	173.16		APBD	Dink			289	289	173.1		APBD	Dinkes										

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana										
				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran													
																												Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
	medis : Dokter		634					6.644		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	kes					6.644		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	es					66.644		Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil											
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	58			749	749	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			749	749	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			749	749	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	29			1.116	1.116	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										



NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
i	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	29			457	457	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			457	457	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			457	457	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
j	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	29			76	76	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			76	76	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			76	76	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
k	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	29			70	70	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70	70	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			70	70	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	29			132	132	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			132	132	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			132	132	173.166.644		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		2.428	2.463	2.463			42,224,759		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	3.299	3.299			42,224,759		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	3.299	3.299			42,224,759		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III)	Buku	29			29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)																								Hasil		
b	Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	6			5	5	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			5	5	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			5	5	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
c	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui	Formulir	2428			29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	aplikasi																									Hasil	
d	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi Kesehatan	Formulir	58			29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media				29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
f	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	31			289	289	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi	Dinkes			289	289	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi	Dinkes			289	289	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Hasil								Hasil								Bagi Hasil	
g	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	29			3	3	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			3	3	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			3	3	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
h	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	32			29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	4.691.639		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
i	Tenaga profesional lainnya	Orang				5	5	4.691.639		APBD Murni, DAK	Dinkes			5	5	4.691.639		APBD Murni, DAK	Dinkes			5	5	4.691.639		APBD Murni,	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana										
				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran													
																												Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
										Non Fisik, Dana Bagi Hasil								Non Fisik, Dana Bagi Hasil								DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil											
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		11.595	11.024	11.024			1,006,776,143		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	16.835	16.835			1,006,776,143		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes	16.835	16.835			1,006,776,143		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	31			29	29	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
b	Reagen Zn TB	Kit	200			20	20	67.118.409		APBD Murni,	Dinkes			20	20	67.118.409		APBD Murni	Dinkes			20	20	67.118.409		APBD Murn	Dinkes										

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana										
				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran													
																												Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
										DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil								, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil								i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil											
c	Masker bedah dan Masker N95	Paket	50.200			518	518	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			518	518	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			518	518	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
d	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen,	Paket	23.190			119	119	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			119	119	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			119	119	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Ose/Lidi), Rak pengering																										
e	Katrid tes cepat molekuler	Test	18.552			7.200	7.200	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			7.200	7.200	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			7.200	7.200	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	31			34	34	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			34	34	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			34	34	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
g	Pedoman/ Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	31			34	34	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana	Dinkes			34	34	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana	Dinkes			34	34	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik,	Dinkes



NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Bagi Hasil								Bagi Hasil								Dana Bagi Hasil	
h	Tuberkulin	Vial				143	143	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			143	143	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			143	143	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
i	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	35			292	292	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			292	292	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			292	292	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
j	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	31			1.116	1.116	67.118.409		APBD Murni, DAK	Dinkes			1.116	1.116	67.118.409		APBD Murni, DAK	Dinkes			1.116	1.116	67.118.409		APBD Murni,	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Non Fisik, Dana Bagi Hasil								Non Fisik, Dana Bagi Hasil								DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
k	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	31			457	457	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			457	457	67.118.409		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			457	457	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	2			76	76	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			76	76	67.118.409		APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			76	76	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
m	Tenaga kesehatan	Orang	31			132	132	67.118.409		APBD Murni,	Dinkes			132	132	67.118.409		APBD Murni	Dinkes			132	132	67.118.409		APBD Murni	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	: Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)									DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil								, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil								i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
n	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	1188			35	35	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			35	35	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			35	35	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
o	Kader Kesehatan	Orang				58	58	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			58	58	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			58	58	67.118.409		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
12	Pelayanan Kesehatan		18.409	18.397	18.397			345,062,941		APBD Murni,	Dinkes	20.335	20.335			345,062,941		APBD Murni	Dinkes	20.335	20.335			345,062,94		APBD Murn	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)									DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil								, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil						1		i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	31			29	29	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
b	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT)	Test	18.409			18.397	18.397	34.506.294		APBD Murni, DAK Non	Dinkes			18.397	18.397	34.506.294		APBD Murni, DAK Non	Dinkes			18.397	18.397	34.506.294		APBD Murni, DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	pertama									Fisik, Dana Bagi Hasil								Fisik, Dana Bagi Hasil								Non Fisik, Dana Bagi Hasil	
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	18.409			18.397	18.397	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			18.397	18.397	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			18.397	18.397	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
d	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor	Paket	18.409			29	29	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik,	Dinkes			29	29	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik,	Dinkes			29	29	34.506.294		APBD Murni, DAK Non	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana										
				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran													
																												Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
	rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK									Dana Bagi Hasil								Dana Bagi Hasil								Fisik, Dana Bagi Hasil											
e	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	31			310	310	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			310	310	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			310	310	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes										
f	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	35			749	749	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik,	Dinkes			749	749	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik,	Dinkes			749	749	34.506.294		APBD Murni, DAK Non	Dinkes										

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
										Dana Bagi Hasil								Dana Bagi Hasil								Fisik, Dana Bagi Hasil	
g	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	31			1.116	1.116	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			1.116	1.116	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	31			132	132	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			132	132	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			132	132	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes
i	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	31			76	76	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik,	Dinkes			76	76	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik,	Dinkes			76	76	34.506.294		APBD Murni, DAK Non	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	t									Dana Bagi Hasil								Dana Bagi Hasil								Fisik, Dana Bagi Hasil	
j	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	29			29	29	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes			29	29	34.506.294		APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil	Dinkes



Tabel 3.2.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang 2024-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023 )	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksan a	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sum ber Pend anaa n	Instansi Pelaksan a						
				Penerima a	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggara n				Peneri ma	Realis asi	Mutu Layanan	Realis asi	Anggaran				Pen erim a	Realis asi	Mutu Layana n	Realis asi	Anggar an									
																												Layana n	Dasar	Layana n	Dasar	Layana n	Dasar
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
	Kabupaten/Kota																																
1.1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	KK/SR	1.225.269	12.452	12.452			17,285,747,503		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR					17,285,747,503		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR					17,285,747,503		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR						
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM)	Sambungan Rumah /SR	413.716			3.133	3.133	4.321.436.875		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR			3.133	3.133	4.321.436.875		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR			3.133	3.133	4.321.436.875		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR						
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak	Rumah Tangga	413.716			3.133	3.133	4.321.436.875		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR			3.133	3.133	4.321.436.875		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR			3.133	3.133	4.321.436.875		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR						

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023 )	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksan a	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sum ber Pend anaan	Instansi Pelaksan a							
				Penerima a	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggara n				Peneri ma	Realis asi	Mutu Layanan	Realis asi	Anggaran				Pen erim a	Realis asi	Mutu Layana n	Realis asi	Anggar an										
																												Layana n	Dasar	Lay ana n	Realis asi	Mutu Layana n	Realis asi	Anggar an
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36							
	berasa, tidak berbusa, tidak berbau																																	
3	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	220.059			1	0	4.321.436.875		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR			1	0	4.321.436.875		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR			1	0	4.321.436.875		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR							
4	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	220.059			1	0	4.321.436.875		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR			1	0	4.321.436.875		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR			1	0	4.321.436.875		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR							
2.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR		1.212.4165	3.940	3.940			10,301,809,582		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR					10,301,809,582		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR					10,301,809,582		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR							
1	Ukuran kuantitas penyediaan	Rumah	803			985	985	3.433.936.52		APBD	DPUPR	650		100		3.433.936.527		APBD MURNI,	DPUPR	650		100		3.433.936.52		APBD	DPUPR							

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023 )	Pencapaian SPM 2024					Inisia si	Sumb er Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksan a	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sum ber Pend anaan	Instansi Pelaksan a						
				Penerim a	Realis asi	Mutu Layana n	Realis asi	Anggara n				Peneri ma	Realis asi	Mutu Layanan	Realis asi	Anggaran				Pen erim a	Realis asi	Mutu Layana n	Realis asi	Anggar an									
																												Layana n	Dasar	Layana n	Dasar	Layana n	Dasar
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
	pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik)	Tangg a						7		MUR NI, DAK FISIK , LAIN NYA								DAK FISIK, LAINNYA						7		MUR NI, DAK FISIK , LAIN NYA							
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke	Ruma h Tangg a				323	323	3.433. 936.52 7		APB D MUR NI, DAK FISIK , LAIN NYA						3.433.93 6.527		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR					3.433. 936.52 7		APB D MUR NI, DAK FISIK , LAIN NYA	DPUPR						

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023 )	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana								
				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran											
																												Layanan	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36								
	SPALD-T																																		
3	syarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	358		662	662		3.433.936.527		APB D MURNI, DAK FISIK , LAIN NYA	DPUPR	650				3.433.936.527		APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA	DPUPR	650				3.433.936.527		APB D MURNI, DAK FISIK , LAIN NYA	DPUPR								

Tabel 3.2.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Magelang 2024-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satu an	Tahu n Dasar (202 3)	Pencapaian SPM 2024					Inisi asi	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisi asi	Sumber Pendana an	Instans i Pelaksa na	Pencapaian SPM (2026)					Inisi asi	Sumber Pendana an	Instans i Pelaksa na	
				Peneri ma Layan an Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Peneri ma Layan an Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Peneri ma Layan an Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	Kabupaten Magelang																											
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		35	18	18			221,966, 628		APBD DAU	DPRKP	22	22			250,000, 000		APBD DAU	DPRKP	22	22			250,000, 000	DPR KP	APBD DAU	DPRKP	
a	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	17			17	17	37,107,6 06						20	20	50,000,0 00						20	20	50,000,0 00				
b	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	1				1	1	184,859, 022						2	2	200,000, 000						2	2	200,000, 000			
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		22	2	2			49,777,2 70		APBD DAU	Disperaki m Prov/DPR KP	2	2			50,000,0 00		APBD DAU	DPRKP	2	2			50,000,0 00		APBD DAU	DPRKP	
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	22			2	2	49,777,2 70						2	2	50,000,0 00						2	2	50,000,0 00				
b	Subsidi uang sewa	Rumah				-	-							-	-							-	-					
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumah				-	-							-	-							-	-					

Tabel 3.2.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Magelang 2024-2026

N O	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satua n	Tahun 2023	Pencapaian SPM (Tahun 2024)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2025)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2026)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana
				Pener ima Layan an Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran			
				13	14	15	16	17				21	22	23	24	25				29	30	31	32	33			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/ Kota																										
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)		1.319. 476	14	14			5,558,89 1,880				14	14			6,000,00 0,000				14	14			6,500,00 0,006			
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	694			25	25	1.389.72 2.970		APBD DAU	Satpol PP dan PK			25	25	1.500.00 0.000		APBD DAU	Satpol PP dan PK			25	25	1.625.00 0.000		APBD DAU	Satpol PP dan PK
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas , pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusakan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang- orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	doku men	3			6	6	1.389.72 2.970		APBD DAU	Satpol PP dan PK			6	6	1.500.00 0.000		APBD DAU	Satpol PP dan PK			6	6	1.625.00 0.000		APBD DAU	Satpol PP dan PK
c	Standar	orang	55			3	3	1.389.72		APBD	Satpol			3	3	1.500.00		APBD	Satpol			3	3	1.625.00		APBD	Satpol

N O	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM (Tahun 2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (Tahun 2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (Tahun 2026)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				13	14	15	16	17				21	22	23	24	25				29	30	31	32	33			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)							2.970		DAU	PP dan PK					0.000		DAU	PP dan PK					0.000		DAU	PP dan PK
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	3			1	1	1.389,72 2.970		APBD DAU	Satpol PP dan PK			1	1	1.500,00 0.000		APBD DAU	Satpol PP dan PK			1	1	1.625,00 0.000		APBD DAU	Satpol PP dan PK
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	1			-	-	-						-	-							-	-				
f	Warga negara yang memperoleh	orang	1			-	-	-						-	-							-	-				

N O	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satua n	Tahun 2023	Pencapaian SPM (Tahun 2024)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2025)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2026)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana
				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran			
				Dasar								Dasar								Dasar							
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)																										
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		463.772	294.352	294.352			294,512,500		APBD DAU	BPBD	294.352	294.352			300,000,000		APBD DAU	BPBD	294.352	294.352			300,000,000		APBD DAU	BPBD
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1			1	1	73.628.125		APBD DAU	BPBD			1	1	75.000.000		APBD DAU	BPBD			1	1	75.000.000		APBD DAU	BPBD



N O	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satua n	Tahun 2023	Pencapaian SPM (Tahun 2024)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2025)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2026)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana
				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran			
				Dasar								Dasar								Dasar							
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	1.319.476			1.324.756	1.324.756	73.628.125		APBD DAU	BPBD			1.324.756	1.324.756	75.000.000		APBD DAU	BPBD			1.324.756	1.324.756	75.000.000		APBD DAU	BPBD
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	463.772			298.724	298.724	73.628.125		APBD DAU	BPBD			298.724	298.724	75.000.000		APBD DAU	BPBD			298.724	298.724	75.000.000		APBD DAU	BPBD
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	57			3	3	73.628.125		APBD DAU	BPBD			3	3	75.000.000		APBD DAU	BPBD			3	3	75.000.000		APBD DAU	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		2.922	298.724	298.724			257,148,000		APBD DAU	BPBD	298.724	298.724			300,000,000		APBD DAU	BPBD	298.724	298.724			300,000,000		APBD DAU	BPBD
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air	unit	8			612	612	128.574.000		APBD DAU	BPBD			612	612	150.000.000		APBD DAU	BPBD			612	612	150.000.000		APBD DAU	BPBD

N O	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satua n	Tahun 2023	Pencapaian SPM (Tahun 2024)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2025)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2026)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana
				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran			
				Dasar								Dasar								Dasar							
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	sanitasi, .... dll)																										
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	2.922			2453	2453	128.574.000		APBD DAU	BPBD			2453	2453	150.000.000		APBD DAU	BPBD			2453	2453	150.000.000		APBD DAU	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		21	462	462			1,406,255,000		APBD DAU	BPBD	462	462			1,500,000,000		APBD DAU	BPBD	462	462			1,500,000,000		APBD DAU	BPBD
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	0			1	1	468.751.666		APBD DAU	BPBD			1	1	500.000.000		APBD DAU	BPBD			1	1	500.000.000		APBD DAU	BPBD
b	Pendataan terhadap warga yang	orang	21			33	33	468.751.666		APBD DAU	BPBD			33	33	500.000.000		APBD DAU	BPBD			33	33	500.000.000		APBD DAU	BPBD

N O	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satua n	Tahun 2023	Pencapaian SPM (Tahun 2024)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2025)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2026)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana
				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran			
				Dasar								Dasar								Dasar							
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	terkena/menja di korban bencana																										
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	doku men	429			-	-							-	-							-	-				
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/waba h zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layan an				-	-																				
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layan an	27			429	429	468.751. 666		APBD DAU	BPBD			429	429	500.000. 000		APBD DAU	BPBD			429	429	500.000. 000		APBD DAU	BPBD
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		100	4117	4117			8,083,94 0,200		APBD DAU	Satpol PP dan PK	4117	4117			8,100,00 0,000		APBD DAU	Satpol PP dan PK	4117	4117			8,100,00 0,000		APBD DAU	Satpol PP dan PK
a	Tingkat waktu tanggap (response time)	layan an	294			170	170	1.347.32 3.366		APBD DAU	Satpol PP dan			170	170	1.350.00 0.000		APBD DAU	Satpol PP dan			170	170	1.350.00 0.000		APBD DAU	Satpol PP dan

N O	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satua n	Tahun 2023	Pencapaian SPM (Tahun 2024)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2025)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2026)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana
				Pener ima Layan an Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/red kar)										PK								PK							PK	
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	doku men	3			3	3	1.347.32 3.366		APBD DAU	Satpol PP dan PK			3	3	1.350.00 0.000		APBD DAU	Satpol PP dan PK			3	3	1.350.00 0.000		APBD DAU	Satpol PP dan PK
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki	unit	354			825	825	1.347.32 3.366		APBD DAU	Satpol PP dan PK			825	825	1.350.00 0.000		APBD	Satpol PP dan PK			825	825	1.350.00 0.000		APBD	Satpol PP dan PK

N O	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satua n	Tahun 2023	Pencapaian SPM (Tahun 2024)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2025)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2026)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana
				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran			
				Dasar								Dasar								Dasar							
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)																										
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	243			253	253	1.347.32 3.366		APBD DAU	Satpol PP dan PK			253	253	1.350.00 0.000		APBD	Satpol PP dan PK			253	253	1.350.00 0.000		APBD	Satpol PP dan PK
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layan an	294			4117	4117	1.347.32 3.366		APBD DAU	Satpol PP dan PK			4117	4117	1.350.00 0.000		APBD	Satpol PP dan PK			4117	4117	1.350.00 0.000		APBD	Satpol PP dan PK
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami	layan an	294			4117	4117	1.347.32 3.366		APBD DAU	Satpol PP dan PK			4117	4117	1.350.00 0.000		APBD	Satpol PP dan PK			4117	4117	1.350.00 0.000		APBD	Satpol PP dan PK

N O	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satua n	Tahun 2023	Pencapaian SPM (Tahun 2024)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2025)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM (Tahun 2026)					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana
				Pener ima Layan an Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Pener ima Layan an Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)																										

Tabel 3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Magelang 2024-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2023)	Target SPM (2024)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota																										
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		748	414	414			603.744.102		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA	500	500			650.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA	500	500			650.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	748			48	48	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			48	48	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			48	48	500.00.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	194			227	227	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			227	227	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			227	227	500.00.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
c	Penyediaan Permakanan	orang	748			24	24	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			24	24	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			24	24	500.00.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
d	Penyediaan Sandang	orang	28			24	24	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			24	24	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			24	24	500.00.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
e	Penyediaan Alat Bantu	pcs	195			144	144	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			144	144	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			144	144	500.00.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	1			24	24	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			24	24	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			24	24	500.00.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	194			414	414	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			414	414	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			414	414	500.00.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang	32			251	251	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			251	251	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			251	251	500.00.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau	orang	2			8	8	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			8	8	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			8	8	500.00.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2023)	Target SPM (2024)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan																										
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	orang	8			6	6	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			6	6	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			6	6	500.00.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	29			24	24	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			24	24	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			24	24	500.00.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	26			16	16	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			16	16	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			16	16	500.00.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
m	Layanan Rujukan	orang	55			74	74	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			74	74	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			74	74	500.00.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	20	209	209			603.744.102		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA	220	220			650.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA	220	220			650.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	20			33	33	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			33	33	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPKBPPPA			33	33	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	orang				33	33	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			33	33	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPKBPPPA			33	33	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
c	Penyediaan Permakanan	orang	20			33	33	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			33	33	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPKBPPPA			33	33	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
d	Penyediaan Sandang	orang	12			33	33	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			33	33	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			33	33	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
e	Penyediaan perbekalan kesehatan	orang				8	8	50.312.008			DINSOS PPKBPPPA			8	8	54.166.667			DINSOS PPKBPPPA			8	8	54.166.667			DINSOS PPKBPPPA
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	18			209	209	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			209	209	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			209	209	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
g	Pemberian bimbingan sosial	orang	10			64	64	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			64	64	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			64	64	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2023)	Target SPM (2024)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	kepada keluarga anak terlantar																										
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	orang	2			25	25	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			25	25	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			25	25	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	5			3	3	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			3	3	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			3	3	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	orang	21			47	47	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			47	47	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			47	47	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	12			16	16	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			16	16	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			16	16	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
1	Layanan Rujukan	orang	5			18	18	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			18	18	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			18	18	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	orang	538	1954	1954			603.744.102		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA	2000	2000			650.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA	2000	2000			650.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	538			1954	1954	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			2000	2000	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			2000	2000	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	orang	453			18	18	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			18	18	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			18	18	50.000.000		APBD DAU	DINSOSPPKBPPA
c	Penyediaan Permakanan	orang	538			171	171	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			171	171	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			171	171	50.000.000		APBD DAU	DINSOSPPKBPPA
d	Penyediaan Sandang	orang	15			17	17	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			17	17	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			17	17	50.000.000		APBD DAU	DINSOSPPKBPPA
e	Penyediaan Alat Bantu	orang	1			25	25	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			25	25	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			25	25	50.000.000		APBD DAU	DINSOSPPKBPPA
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	1			17	17	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			17	17	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			17	17	50.000.000		APBD DAU	DINSOSPPKBPPA
g	Pemberian	orang	132			237	237	46.441.854		APBD	DINSOS			237	237	50.000.000		APBD	DINSOS			237	237	50.000.000		APBD	DINSOSPPK

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2023)	Target SPM (2024)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial									DAU	PPKBPPPA							DAU	PPKBPPPA							DAU	BPPPA
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang	9			45	45	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			45	45	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			45	45	50.000.000		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	orang	0			3	3	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			3	3	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			3	3	50.000.000		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	2			5	5	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			5	5	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			5	5	50.000.000		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	orang	9			17	17	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			17	17	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			17	17	50.000.000		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	10			16	16	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			16	16	50.000.000		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			16	16	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
m	Layanan Rujukan	orang	12			6	6	46.441.854		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			6	6	50.000.000		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			6	6	50.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	75	56	56			603.744.102		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA	75	75			650.000.000		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA	75	75			650.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	18			33	33	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			50	50	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			50	50	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi	orang	10			33	33	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			50	50	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			50	50	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2023)	Target SPM (2024)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
c	cepat																										
c	Penyediaan Permakanan	orang	38			33	33	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			50	50	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			50	50	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
d	Penyediaan Sandang	orang	32			33	33	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			50	50	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			50	50	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	1			33	33	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			50	50	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			50	50	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	orang	75			33	33	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			50	50	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			50	50	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	orang	16			51	51	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			51	51	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			51	51	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	1			3	3	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			3	3	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			3	3	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
i	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	2			5	5	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			5	5	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			5	5	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	orang	70			47	47	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			47	47	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			47	47	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	57			56	56	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			56	56	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			56	56	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
1	Layanan Rujukan	orang	13			8	8	50.312.008		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			8	8	54.166.667		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			8	8	54.166.667		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
5	Perlindungan	orang	456	462	462			492,458,000		APBD	DINSOS	462	462			507,926,00		APBD	DINSOSPPK	462	462			507,926,000		APBD	DINSOS

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2023)	Target SPM (2024)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendaan	Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota									DAU	PPKBPPPA					0		DAU	BPPPA							DAU	PPKBPPPA
a	Penyediaan Permakanan	orang	260			462	462	168,032,000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			462	462	168.000.000		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			462	462	168.000.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
b	Penyediaan Sandang	orang	120			150	150	73,950,000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			150	150	73.950.000		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			150	150	73.950.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit	30			12	12	88.600.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			12	12	88.600.000		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			12	12	88.600.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang	20			150	150	72.900.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			150	150	72.900.000		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			150	150	72.900.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	4			395	395	88,976,000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA			395	395	104.476.000		APBD DAU	DINSOSPPK BPPPA			395	395	104.476.000		APBD DAU	DINSOS PPKBPPPA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di Daerah.

Dokumen perencanaan Daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah sampai ke penjabaran operasionalnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dipastikan menjadi isu strategis Daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis Daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
  - d. Rencana kerja dan pendanaan Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:

- a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM ke dalam Penggaggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai instrument rencana pembangunan tahunan Daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan Daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar.



## BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

### 4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan Pelayanan Dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di Daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka;
2. pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan;
3. waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya;
4. penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan;
5. penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan;
6. pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.



Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. pemeriksaan/auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Magelang, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
  - 1) Apa saja kebijakan Daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
  - 2) Apakah kebijakan Daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
  - 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
  - 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
    - (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
    - (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
    - (c) Bagaimana Daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan Pelayanan Dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
    - (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
  - 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
  - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan Perangkat Daerah

pelaksana Pelayanan Dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?

- 3) Jika ada kerjasama Daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (Daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di Daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
  - 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
  - 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
  - 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara parielabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layananannya? Sebaliknya, atautakah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? Perangkat Daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
  - 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
  - 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
  - 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termamfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
  - 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar Pelayanan Dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh Daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
  - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
  - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
  - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
  - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
  - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
  - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di Daerah?
  - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
  - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang fgfvvmasih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan Pelayanan Dasar yang dibutuhkan masyarakat. Renaksi Penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan, penerima dan Mutu Payanan Dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 3 (tiga) tahun ke depan.

### 5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Magelang.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Magelang berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Magelang secepatnya mengoordinasikan rencana aksi Daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Magelang, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>.
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara